BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 3 (tiga) aspek utama yang penting yang menjadi indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dianalisis yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum kondisi Daerah menjadi dasar didalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografis perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Secara rinci analisis geografis Daerah dilakukan terhadap:

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Daerah mencakup luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 Daerah terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Daerah mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh)

kecamatan

kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum.

Berdasarkan posisi geografisnya, Daerah berbatasan dengan beberapa Kecamatan di kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

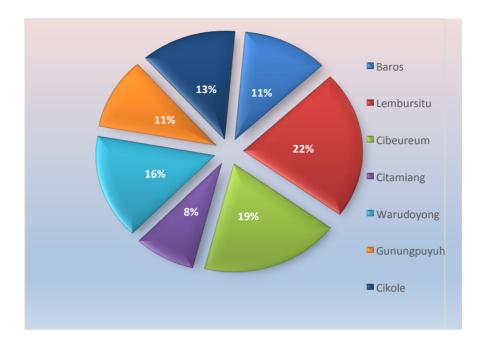
- 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- 3. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- 4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Wilayah administrasi Daerah terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Jarak terjauh dari Balai Kota Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 (tujuh) km. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 sedangkan persentase luas wilayah Daerah per kecamatan disajikan pada Gambar 2.1 dan peta administrasi wilayah Daerah disajikan pada Gambar 2.2 dibawah ini.

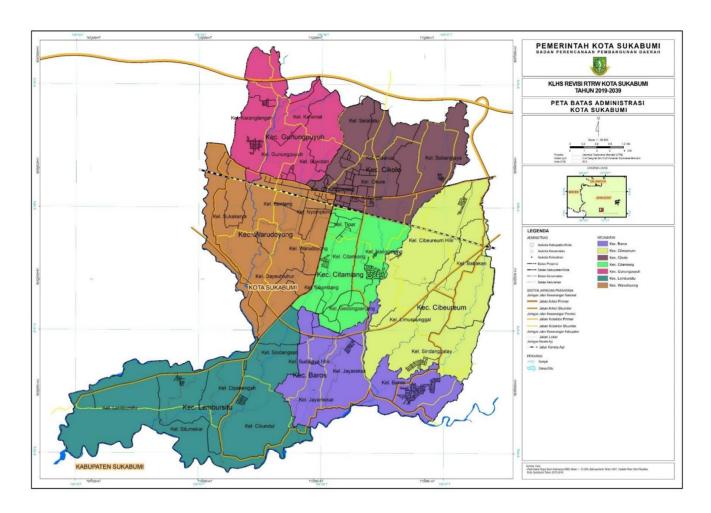
Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Daerah

NO.	KECAMATAN	Luas (km²)
1	Baros	5,583
2	Lembursitu	10,692
3	Cibeureum	9,122
4	Citamiang	4,004
5	Warudoyong	7,563
6	Gunungpuyuh	5,151
7	Cikole	6,216
	LUAS TOTAL	48,332

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun, 2019



Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Kota Sukabumi Menurut Kecamatan
(Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun, 2019)



Gambar 2.2 Peta Administrasi Daerah

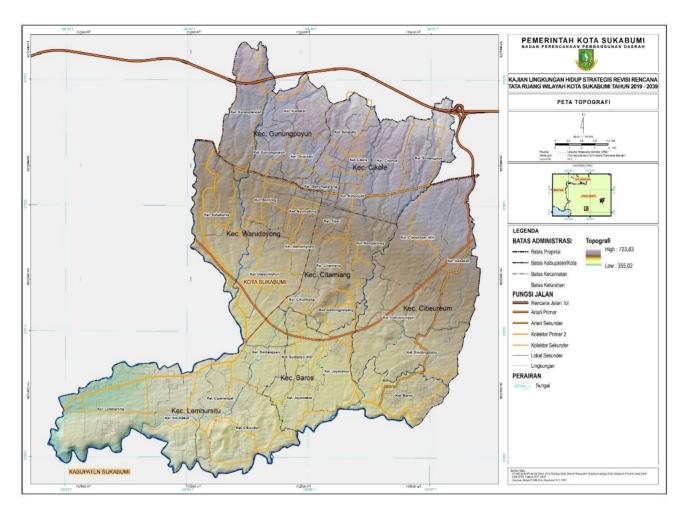
(Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Daerah terletak pada bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat, pada titik koordinat 106° 45′ 50″ BT - 106° 45′ 10″ BT sampai dengan 6° 49' 29" LS - 6° 50' 44" LS, secara geografis Kota Sukabumi terletak di antara pusat pertumbuhan mega urban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 96 (sembilan puluh enam) KM dan Jarak dari Ibu Kota Negara (Jakarta) ± 120 (seratus dua puluh) KM. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Letak Daerah yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibu Kota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja. Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kota Sukabumi, karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik dari sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya.

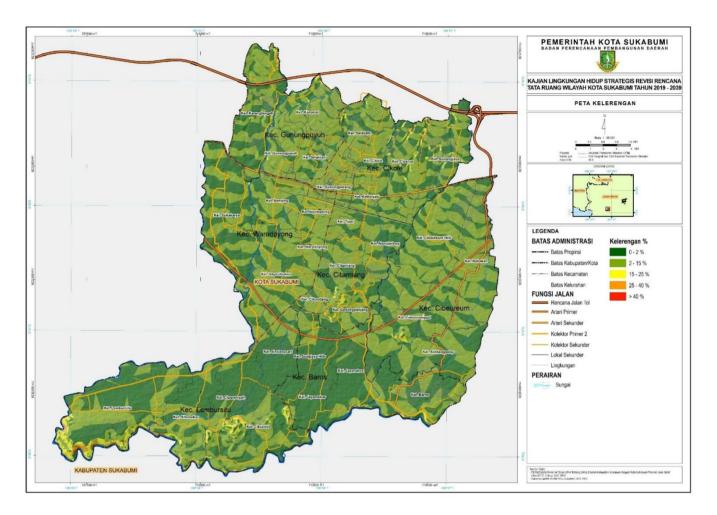
2.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lahan

Wilayah Daerah merupakan lereng selatan dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter di atas permukaan laut. Dengan bentuk bentang alam yang relatif datar sampai bergelombang dengan kemiringan lahan (lereng) diperkirakan relatif beragam. Adapun kondisi topografi dan kemiringan lereng di wilayah Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan 2.4 berikut ini.



Gambar 2.3 Peta Topografi Daerah

(Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)



Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Daerah (Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

2.1.1.4. Struktur Geologi

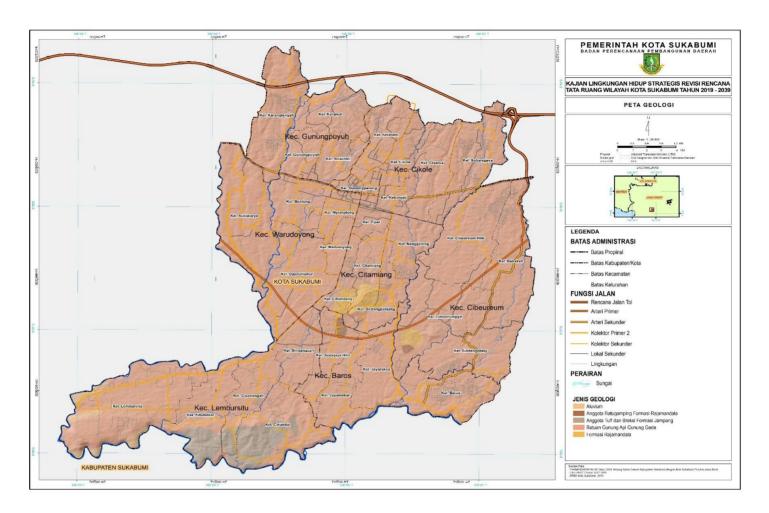
Susunan litologi batuan di Daerah dan sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari formasi walat berumur oligosen awal merupakan satuan tertua yang dapat dijumpai di daerah ini. Formasi walat ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari oligosen akhir sampai miosen awal. Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur miosen awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi.

Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.2
Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri

1	Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri						
NO	KECAMATAN	SIMBOL	FORMASI	LUAS (Ha)			
1	Baros Qvg		Batuan Gunung Api Gunung Gede	548,34			
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	8,32			
		Tmor	Formasi Rajamandala	1,55			
2	Cibeureum	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	894,63			
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	3,65			
		Tmor	Formasi Rajamandala	15,09			
3	Cikole	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	620,81			
4	Citamiang	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	350,85			
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	0,34			
		Tmor	Formasi Rajamandala	49,21			
5	Gunungpuyuh	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	513,60			
6	Lembursitu	Qa	Aluvium	38,53			
		Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	876,39			
		Tmjt	Anggota Tuff dan Breksi Formasi Jampang	155,24			
7	Warudoyong	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	756,39			

Sumber: KLHS Revisi RTRW Kota Sukabumi, 2020



Gambar 2.5

Peta Geologi Daerah (Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

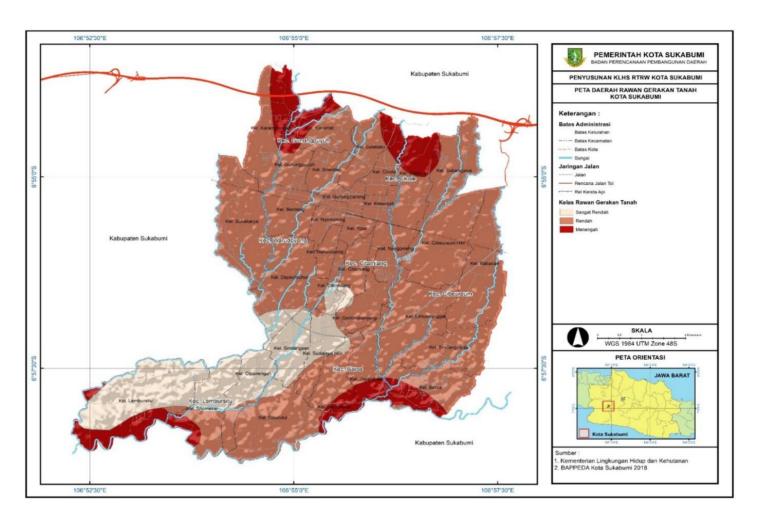
Berdasarkan.....

Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Daerah termasuk kedalam kisaran zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah sampai sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini memungkinkan terjadinya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan tinggi. Adapun luas gerakan tanah di Daerah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan secara spasial disajikan pada Gambar 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.3 Luas Potensi Gerakan Tanah di Daerah

NO	KECAMATAN	POTENSI RAWAN GERAKAN TANAH	LUAS (Ha)
1	Baros	Menengah	136,59
		Rendah	352,22
		Sangat Rendah	69,47
2	Cibeureum	Rendah	913,37
3	Cikole	Menengah	114,64
		Rendah	506,17
4	Citamiang	Rendah	358,70
		Sangat Rendah	41,73
5	Gunungpuyuh	Menengah	147,56
		Rendah	366,04
6	Lembursitu	Menengah	124,15
		Rendah	334,04
		Sangat Rendah	611,90
7	Warudoyong	Rendah	722,92
		Sangat Rendah	33,43

Sumber : KLHS Revisi RTRW Kota Sukabumi, 2020

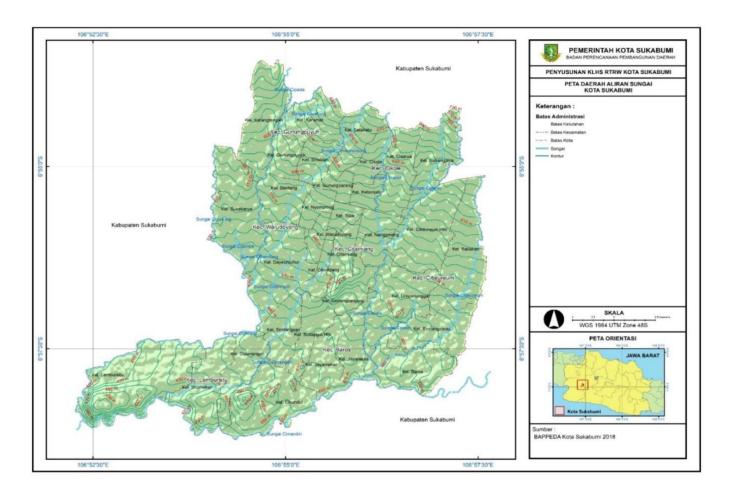


Gambar 2.6 Peta Rawan Gerakan Tanah di Daerah

(Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi air tanah di Daerah dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah, mata air dan air tanah tertekan. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai-sungai yang melewati Daerah disajikan dalam Gambar 2.7 dibawah ini.



Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai Daerah (Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

2.1.1.6. Klimatologi

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, wilayah Daerah sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa. Suhu udara ratarata di wilayah Daerah berkisar antara 26°C–28°C. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Daerah menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada musim bulan Agustus. Curah hujan harian pada Stasiun Cimandiri dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

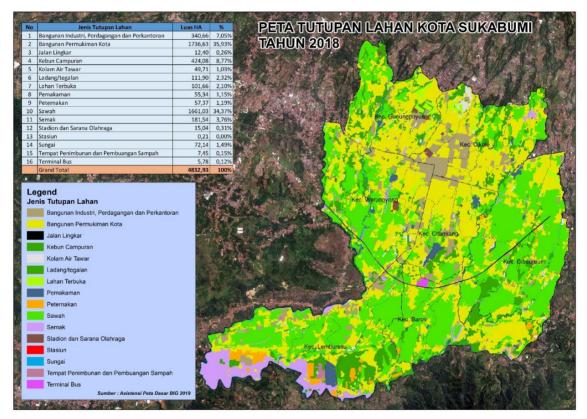
Tabel 2.4 Curah Hujan Daerah

<i>m</i> 1						Вι	ılan						Tahunan
Tgl	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	0	11	23	0	0	0	0	0	0	0	29	2	
2	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	49	6	
3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	
4 5	6 1	8	3	3	0	1 7	0	0	0	2	9	13	
6	9	7	65	16 15	51 0	0	0	0	6	0	0	0 5	
7	4	16	111	4	0	0	0	0	0	0	0	32	
8	0	12	23	61	0	0	0	0	6	0	11	8	
9	39	23	7	2	0	0	0	Ö	16	Ö	13	2	
10	4	8	4	15	0	0	0	0	0	0	6	5	
11	19	0	2	0	2	0	0	0	0	0	29	3	
12	10	11	11	0	0	0	0	0	0	0	46	0	
13	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	5	
14	4	5	15	0	0	0	0	0	0	0	17	9	
15	27	2	20	8	0	0	0	0	0	9	3	126	
16	7	60	0	15	12	0	0	0	0	21	3	1	
17	6 2	0	10 1	2 4	26 11	0	0	0	0	7 0	0 11	44 0	
18 19	12	0	3	17	61	0	0	0	0	0	0	13	
20	11	19	1	9	37	0	0	0	6	0	5	0	
21	21	0	0	11	3	13	0	0	10	0	0	0	
22	20	3	0	2	8	0	0	0	0	4	2	0	
23	14	4	0	4	0	25	0	0	2	1	0	0	
24	5	1	60	26	5	23	0	0	0	0	0	7	
25	8	2	41	0	0	30	0	0	0	5	1	4	
26	7	6	52	9	0	9	0	0	0	14	0	14	
27	41	7	35	0	11	5	0	0	46	7	6	2	
28	5	41	2	0	6	0	0	0	0	0	13	1	
29	21		0	0	0	0	0	0	0	0	51	5	
30	19		0	0	0	0	0	0	0	1	16	7	
31	18 41	60	82 111	6.1	0 61	30	0	0	16	4 21	F1	1 126	126
Hujan Maks. Jml Curah		60		61					46		51		
Hujan	349	250	593	223	233	113	0	0	103	75	351	317	2607
Jml Hari hujan	27	20	24	18	12	8	0	0	8	11	22	24	174
Jml Hujan (1-15)	132	107	306	124	53	8	0	0	39	11	243	218	
Jml Data Kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jml Hujan (16-31)	217	143	287	99	180	105	0	0	64	64	108	99	
Jml Data Kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2019

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Daerah berdasarkan pada hasil pengamatan lapangan dan intepretasi dari foto citra didominasi oleh kegiatan sawah, bangunan permukiman kota, kebun campuran, dan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan sawah merupakan yang terbesar yaitu seluas 1.661,03 Ha atau seluas 34,37% dari total luas Daerah. Penggunaan lahan untuk bangunan permukiman kota seluas 1.736,63 Ha atau 35,93% dari luas wilayah kota, sedangkan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran seluas 340,66 Ha (7,05%).



Gambar 2.8
Peta Tutupan Lahan di Daerah Tahun 2018
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2018)

a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Daerah terdiri dari atas kawasan pertanian, perikanan, sentra insdutri kecil dan menengah, pariwisata, permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

1. kawasan pertanian

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian yang termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B0 seluas 425,33 Ha yang terletak di Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Gunungpuyuh.

2. kawasan perikanan

Kawasan perikanan meliputi balai benih ikan di Kecamatan Warudoyong dan kawasan penelitian Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBAT) di Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole.

3. kawasan sentra industri kecil dan menengah

Kegiatan industri di wilayah Daerah diarahkan untuk mendukung kegiatan perekonmian di wilayah Daerah maupun potensi sektor primer di wilayah sekitarnya. Kegiatan industri yang diarahkan di wilayah Daerah adalah sentra industri kecil dan menengah. Sentra industri kecil dan menengah dikembangkan di Kecamatan Warudoyong untuk mendukung kegiatan perkonomian di wilayah Daerah dan penyerapan tenaga kerja.

4. kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata dan juga kawasan yang karena sifat dan sumberdaya yang ada di dalamnya (yaitu sumberdaya budaya, alam dan buatan), makan kawasan ini sengaja dideliniasi sebagai kawasan pariwisata.

Jenis kegiatan wisata di Daerah meliputi wisata budaya, wisata edukasi, wisata alam, agrowisata, yaitu :

- a) Kawasan wisata cikundul (KAC) Kawasan Agroeduwisata Cikundul), Kawasan Cikundul tersebut merupakan kawasan peternakan dan pertanian.
- b) Kawasan pariwisata Air Panas Cikundul di Kecamatan Lembursitu.
- c) Ekowisata Villa Cantik di Kecamatan Warudoyong.

- d) Taman rekreasi Santa di Kecamatan Citamiang.
- e) Wisata sungai Cimandiri di Kecamatan Lembursitu.
- f) Kawasan pariwisata Rengganis di Kecamatan Gunungpuyuh
- g) KAwasan vihara widhi sakti di Kecamatan Warudoyong
- h) Museum Pegadaian.
- i) Wisata kompleks Lapang Merdeka, Alun-Alun, dan Pendopo.

5. kawasan permukiman

Kawasan permukiman terdiri dari kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, olahraga, transportasi, ruang terbuka non hijau (RTNH), dan kawasan peruntukkan ruang bagi sektor informal.

6. kawasan pertahanan dan keamanan

kawasan pertahanan dan keamanan yaitu SETUKPA Lemdiklat POLRI di Keccamatan Gunung Puyuh sebagai kawasan pendidikan bagi calon perwira POLRI.

b. Kawasan Lindung

Jenis kawasan lindung di Kota Sukabumi meliputi :

1. kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kota Sukabumi salah satunya adalah sempadan sungai. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, mempunyai manfaat yang penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Kawasan sempadan sungai diarahkan pada sepanjang kiri kanan sungai yang melintasi Kota Sukabumi yaitu sungai cibandung, cibereum, cibitung, cigunung, cimandiri, cipada, cipanengah, cipelang, cipelang leutik, cisaray, cisarua, cisuda, ciwalung Luas kawasan sempadan sungai untuk sungai-sungai yang ada di Kota Sukabumi yaitu seluas 183,00 Ha.

2. kawasan rawan bencana

Terdapat tiga kawasan rawan bencana di Daerah yaitu rawan bencana gempa bumi, rawan bencana gunung api, rawan bencana gerakan tanah. Berdasarkan peta sesar cimandiri, wilayah selatan Sukabumi adalah wilayah yang paling dekat dengan sesar. Akan tetapi, hamper seluruh Kota Sukabumi terpapar oleh ancaman bendaca gempa bumi. Selanjutnya, ancaman bencana gunung api di Daerah berupa aliran lahar dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang mengalir melalui tuga sungai, yaitu sungai Cibeureum, Cipelang, dan Cigunung. Terakhir, mengenai potensi terhadap ancaman bencana gerakan tanah bersifat local di beberapa wilayah di bagian utara Daerah, yaitu Kelurahan Subangjaya, Cisarua, dan Karangtengah, serta di bagian selatan Daerah yaitu di Kelurahan Lembursitu dan sedikit di Kelurahan Situmekar, Cikundul, Jayamekar, dan Limusnunggal.

3. kawasan cagar budaya

Kriteria kawasan lindung untuk cagar budaya yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan situs yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi bangunan pada kawasan ini tidak dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan.

Di Kota Sukabumi pada saat ini terdapat kawasan dan bangunan cagar budaya, meliputi :

- a) Kawasan Jl. Kaswari Jl Kenari dan Jl. Bhayangkara
- b) Kawasan perdagangan Jl. Ahmad Yani
- c) Kawasan Jl. Stasiun Jl. Otista
- d) Kawasan alun-alun, Jl. Perintis Kemerdaan dan Jl. Veteran
- e) Kawasan Pendopo Kabupaten Sukabumi
- f) Kawasan Jl. Siliwangi
- g) Kawasan Museum Pegadaian
- h) Kawasan Jl. Odeon Jl. Pajagalan
- i) Kawasan Jl. Suryakencana
- j) Kawasan Jl. R. Samsudin SH Jl. Ir. Juanda Jl. RE Martadinata
- k) Kawasan BBAT

1) Kawasan Kota Paris

4. ruang terbuka hijau (RTH)

Kawasan ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikan terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Ruang terbuka publik antara lain meliputi taman (taman lingkungan skala RT, RW, Kecamatan, dan Kota), pemakaman, taman kota, dan jalur hijau jalan.

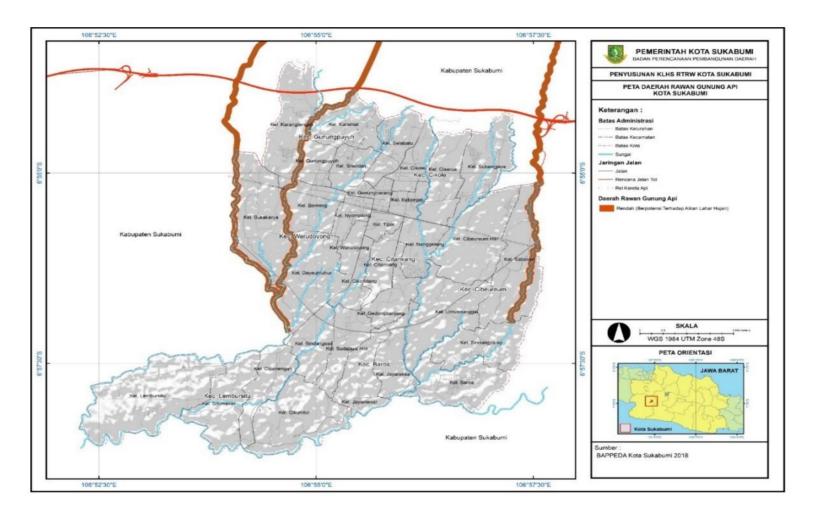
2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Daerah merupakan salah satu di antara daerah yang cukup rawan letusan gunung berapi karena letaknya relatif dekat dengan Gunung Gede Pangrango. Selain itu wilayah Daerah juga rawan gempa bumi karena terletak di sesar atau patahan Cimandiri. Daerah potensi gempa di Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.5 sedangkan peta rawan letusan gunung berapi serta peta rawan gempa disajikan berturut-turut pada Gambar 2.9 dan Gambar 2.10 berikut ini.

Tabel 2.5 Potensi Gempa di Kota Sukabumi

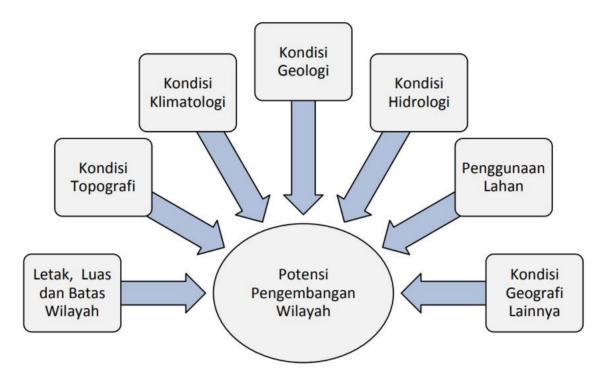
No	Kecamatan	Potensi gempa	Luas (Ha)
1	Baros	Daerah Aman	97,69
		Daerah Rawan Gempa	462,78
2	Cibeureum	Daerah Aman	835,26
		Daerah Rawan Gempa	96,94
3	Cikole	Daerah Aman	644,37
4	Citamiang	Daerah Aman	382,96
5	Gunungpuyuh	Daerah Aman	514,23
6	Lembursitu	Daerah Aman	49,10
		Daerah Rawan Gempa	1.046,25
7	Warudoyong	Daerah Aman	758,23
		Daerah Rawan Gempa	1,41

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019



Gambar 2.9 **Peta Rawan Gunung Api Kota Sukabumi** (Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019)

Berikut disajikan kerangka pemikiran antara kondisi geografi Daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya:



Gambar 2.10 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya (Sumber: PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)

2.1.2. Demografi

Letak Daerah sangat strategis karena berada pada jalur lintasan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Kota Negara, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, sehingga menjadikan Daerah sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Jumlah penduduk Daerah tahun 2019 adalah 348.945 (tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima) jiwa yang terdiri atas 175.391 (seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu) jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 50,26% (lima puluh koma dua puluh enam persen) dan 173.554 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat) jiwa penduduk perempuan atau sebesar 49,74% (empat puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen) dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,06 (seratus satu koma nol enam). Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Daerah tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Daerah Tahun 2015- 2019

	Kecamatan	Jen	Rasio		
No		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jenis Kelamin
1	Baros	18.991	18.584	37.575	102,19
2	Lembursitu	20.522	20.685	41.207	99,21
3	Cibeureum	21.705	21.194	42.899	102,41
4	Citamiang	27.180	27.054	54.234	100,47
5	Warudoyong	30.263	29.404	59.667	102,92
6	Gunungpuyuh	24.878	24.287	49.165	102,43
7	Cikole	31.852	32.346	64.198	98,47
	Tahun 2019	175.391	173.554	348.945	101,06
Tahun 2018		173.376	171.421	344.797	101,14
Tahun 2017		169.392	166.474	335.866	101,75
Tahun 2016		166.971	164.003	330.974	101,81
	Tahun 2015	162.311	159.017	321.328	102,07

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019 Disdukcapil Kota Sukabumi

<u>Dari</u>

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Daerah mengalami pertambahan tiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk Daerah Tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Tahun 2014 - 2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun (%)
1	2014	320.572	1,02
2	2015	321.328	0,98
3	2016	330.974	0,94
4	2017	335.866	0,84
5	2018	344.797	0,77
5	2019	348.945	0,73

Sumber: Kota Sukabumi dalam Angka, 2019

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu:

- 1. laju pertumbuhan ekonomi (LPE; %);
- 2. laju inflasi (%);
- 3. ketimpangan kemakmuran (gini ratio);
- 4. PDRB perkapita (ADHB); dan
- 5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT).

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi Daerah senantiasa bergerak positif. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2013-2019 menunjukkan tren yang fluktuatif, mengalami perlambatan pada tahun 2015 dan 2017. Perlambatan ekonomi dari tahun 2015 salah satunya adalah sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak

sebagai

sebagai akibat dicabutnya subsidi pemerintah pada tahun 2013. Langkah ini berakibat kepada berbagai kategori lapangan usaha ekonomi di Daerah. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Daerah berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, tahun 2015, 2017 dan tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Daerah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8

LPE Daerah dan LPE Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2019

Ma	Vote / Drowinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/%)						
No	Kota/Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Sukabumi	5,41	5,43	5,14	5,64	5,43	5,51	5,49
2	Jabar	6,33	5,09	5,05	5,66	5,33	5,66	5,07

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020

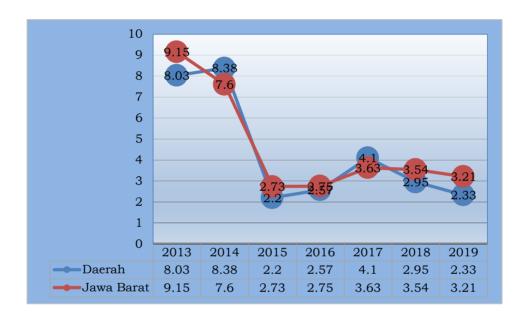
2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan atau *demand* dan penawaran atau *supply*. Daerah merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kota di Provinsi Jawa Barat yang merupakan lokasi pemantauan laju inflasi dan indeks harga konsumen.

Angka inflasi di Daerah pada tahun 2013-2014 cenderung tinggi yaitu 8,03%-8,38% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti kenaikan tarif dasar listrik dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang mendorong inflasi meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Angka inflasi di Daerah dapat dikendalikan pada tahuntahun berikutnya dan mencapai 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) pada tahun 2019. Walau sempat mengalami kenaikan angka inflasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,10 (empat koma sepuluh), rata-rata angka inflasi di Daerah berada di bawah angka inflasi Provinsi Jawa

<u>Barat</u>

Barat. Penyebab kenaikan inflasi di Daerah dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta pada kelompok pengeluaran kesehatan. Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut, koordinasi dan intensitas komunikasi terus ditingkatkan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota di Jawa Barat melalui Forum Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID sebagai upaya untuk menahan laju inflasi agar tetap terkendali. Laju Inflasi di Daerah dan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.11 berikut ini.



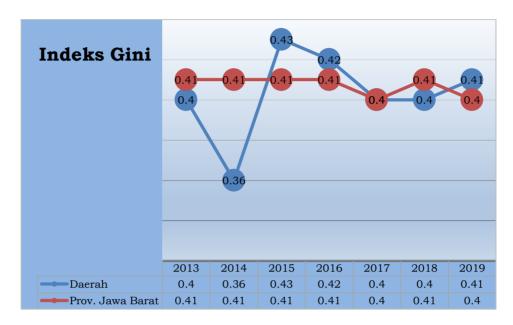
Gambar 2.11 Laju Inflasi Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019

(Sumber : BPS Kota Sukabumi)

2.2.1.3. Ketimpangan Kemakmuran

Pada tahun 2013-2019, indeks Gini Daerah menunjukan kondisi yang berfluktuasi. Indeks Gini tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai angka 0,43 (nol koma empat puluh tiga). Angka ini relevan dengan kondisi kemiskinan yang mengalami kenaikan di tahun yang sama. Pada tahun 2016 indeks Gini Daerah telah menurun meskipun secara angka berada pada 0,42 (nol koma empat puluh dua) dan masih berada di atas indeks Gini Provinsi Jawa Barat. Meskipun masih masuk dalam ketimpangan moderat, namun hal ini harus menjadi perhatian khusus. Ketimpangan yang tinggi

akan menyebabkan lebih rawan terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh. Perkembangan indeks Gini Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.12 berikut ini.



Gambar 2.12 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Sukabumi Dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019

(Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

Produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Daerah tahun 2019 mencapai Rp. 12.384.001.280.000,- (dua belas trilyun tiga ratus delapan puluh empat milyar satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau mengalami pertumbuhan 7,96% (tujuh koma sembilan puluh enam persen) dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp. 11.471.248.900.000,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Nilai pertumbuhan yang dimiliki oleh PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga selain peningkatan produksi. Nilai PDRB Daerah atas dasar harga konstan

(tahun dasar 2010) tahun 2019 sebesar Rp. 8.659.534.250.000,-(delapan trilyun enam ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,49% (lima koma empat puluh sembilan persen), dari Rp. 8.208.782.390.000,- (delapan trilyun dua ratus delapan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) di tahun 2018. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan produksi barang atau jasa yang nyata terjadi dan telah mengeliminir faktor kenaikan harga, sehingga mencerminkan LPE yang sesungguhnya tercipta. Jika dicermati, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku bergerak dengan lebih cepat dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga kontan. Hal tersebut menunjukkan besarnya dampak perubahan harga atau inflasi terhadap perekonomian. Sekilas perekonomian tampak tumbuh dengan pesat padahal kenyataannya peningkatan produksi sebenarnya yang terjadi tidaklah setajam itu karena tergerus oleh faktor inflasi. Maka dari itu, untuk menilai pertumbuhan rill digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Daerah Tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9
PDRB Daerah Tahun 2013-2019
(dalam jutaan rupiah)

Tahan	Penilaian					
Tahun	ADHB	ADHK				
2013	7.309.646,73	6 301 682,60				
2014	8.140.751,03	6.643.603,95				
2015	8.971.328,27	6 985 333,28				
2016	9 718 687,89	7.379.481,72				
2017	10 549 217,87	7 780 422,68				
2018	11 471 248.90	8 208 782,39				
2019	12 384 001,28	8 659 534,25				

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

terbuka TPT Tingkat pengangguran atau merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran di Daerah dalam kurun waktu 2013-2019 menurun sebesar 24,51% (dua puluh empat koma lima puluh satu persen) dari 11,18% (sebelas koma satu delapan persen) pada tahun 2013 menjadi 8,44% (delapan koma empat empat persen) pada tahun 2019. Walaupun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 TPT Daerah berada di atas Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016-2017 TPT Daerah menurun bahkan berada di bawah Provinsi Jawa Barat, tetapi Daerah mengalami kenaikan kembali di dua tahun berikutnya. Capaian TPT Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 di sajikan pada Gambar 2.13 berikut ini.



Gambar 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 (Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial diukur melalui 8 (delapan) indikator yaitu:

- 1. jumlah penduduk;
- 2. laju pertumbuhan penduduk (LPP; %);

3. indeks

- 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 4. tingkat kemiskinan (%)
- 5. angka melek huruf (AMH);
- 6. angka rata-rata lama sekolah (RLS);
- 7. angka harapan lama sekolah (HLS);
- 8. angka harapan hidup (AHH); dan
- 9. persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I.

2.2.2.1. Jumlah Penduduk

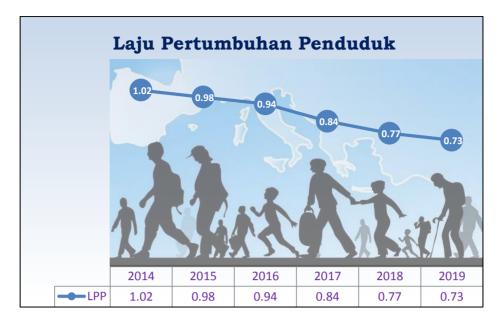
Jumlah penduduk Daerah tahun 2019 adalah 348.945 (tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima) jiwa, meningkat sebesar 28.373 (dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) jiwa dari jumlah penduduk tahun 2014 yaitu sebesar 320.572 (tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua) jiwa atau persentase peningkatan jumlah penduduk tahun 2014-2019 sebesar 8,13% (delapan koma tiga belas persen). Adapun rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan terus menurun dari 102,77% (seratus dua koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2015 menjadi 101,06% (seratus satu koma nol enam persen) pada tahun 2019.

Kepadatan penduduk di Daerah pada tahun 2019 adalah 7.220 (tujuh ribu dua ratus dua puluh) jiwa/km², artinya setiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 7.220 (tujuh ribu dua ratus dua puluh) s.d 7.221 (tujuh ribu dua ratus dua puluh satu) jiwa, meningkat 8,87% (delapan koma delapan tujuh persen) apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Tahun 2015 sebesar 6.648 (enam ribu enam ratus empat puluh delapan) jiwa/km².

2.2.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk Daerah pada kurun waktu tahun 2014-2019 menurun dari 1,02 (satu koma nol dua) pada tahun 2014 menjadi 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) pada tahun 2019.

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Daerah dalam kurun waktu 2014–2019 disajikan pada Gambar 2.14 berikut ini.



Gambar 2.14 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah (Sumber: Kota Sukabumi dalam Angka 2019)

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human development index* atau HDI yang diperkenalkan oleh *United Nation Developmen Programme* (UNDP). UNDP mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar yaitu:

- 1. umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);
- 2. pengetahuan (knowledge); dan
- 3. standar hidup layak (decent standard of living).

Nilai capaian IPM dapat digunakan untuk membandingkan keberhasilan dalam upaya pembangunan manusia antar daerah atau negara.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi dalam perhitungan IPM, ada beberapa alasan yang melandasi perubahan metodologi perhitungan yaitu:

1. beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat

menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik;

- 2. produk domestik bruto atau PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; dan
- 3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Dua perubahan yang dilakukan yaitu perubahan indikator dan perubahan metode perhitungan. Perubahan indikator yang dilakukan yaitu: Angka Melek Huruf atau AMH pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah atau HLS dan Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto atau PNB per kapita. Sedangkan metode perhitungan berubah dari metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Nilai IPM Daerah pada kurun waktu Tahun 2013-2019 terus menunjukan peningkatan dan berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Barat. IPM Daerah sudah berhasil masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2013 dengan angka 70,81 (tujuh puluh koma delapan satu), sedangkan Provinsi Jawa Barat baru masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2016. Pada tahun 2019, IPM Daerah sudah mencapai angka 74,31 (tujuh puluh empat koma tiga satu). Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.15 berikut ini.



Gambar 2.15 Grafik Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019

(Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

Berdasarkan gambar diatas IPM Kota Sukabumi dari tahun ke tahun masih di atas IPM Provinsi dan Nasional.

2.2.2.4. Tingkat Kemiskinan

Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) jiwa, menurun menjadi 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) jiwa pada tahun 2019. Pemerintah Daerah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 8,05% (delapan koma nol lima) pada tahun 2013 menjadi 6,67% (enam koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2019. Artinya pada periode tahun 2013 sampai 2019 Pemerintah Daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,38% (satu koma tiga puluh delapan persen).

Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, Daerah memiliki tingkat kemiskinan di bawah Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin di Daerah dan Provinsi Jawa Barat serta perbandingan persentase penduduk miskin Daerah dengan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.16 berikut ini.

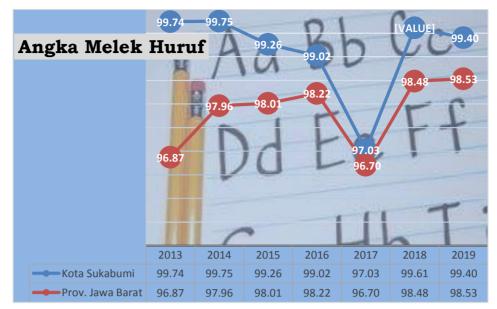


Gambar 2.16 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019

(Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

2.2.2.5. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf atau AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. AMH Daerah dalam kurun waktu 2013-2019 sudah mencapai rata-rata di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya terdapat lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah yang bisa membaca dan menulis. Pencapaian AMH Daerah berada di atas capaian AMH Provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran 96-98% di Tahun 2013-2019 sebagaimana disajikan pada Gambar 2.17 berikut ini.



Gambar 2.17 Capaian AMH Daerah Tahun 2013-2019 (Sumber: Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

2.2.2.6. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah atau RLS merupakan ukuran untuk menghitung jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Pencapaian RLS Daerah cenderung terus mengalami peningkatan pada Tahun 2013 hingga Tahun 2019. Pada Tahun 2013, RLS Kota Sukabumi sebesar 8,52 (delapan koma lima puluh dua) Tahun. Pada Tahun 2019 RLS Kota Sukabumi mencapai 9,58 (sembilan koma lima puluh delapan) Tahun berarti selama rentang 6 tahun terjadi peningkatan sebesar 1,06 (satu koma nol enam). Nilai RLS Kota Sukabumi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan dengan daerah-daerah sekitarnya seperti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Capaian RLS di Daerah disajikan pada Gambar 2.18 berikut ini.



Gambar 2.18 Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Daerah Tahun 2013-2019

(Sumber: Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

2.2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau HLS Daerah pada tahun 2019 mencapai 13,46 (tiga belas koma empat puluh enam) tahun, meningkat 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari angka HLS tahun 2013 yaitu 13,08 (tiga belas koma nol delapan) tahun. Angka HLS sebesar 13,46 (tiga belas koma empat enam) tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Daerah sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi dan sudah melampaui angka HLS Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013-2019. Perkembangan HLS Daerah dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.19 berikut ini.



Gambar 2.19 Perkembangan Angka HLS Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 (Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

<u>Dari</u>

Dari tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa peningkatan HLS Daerah tahun 2013-2019 relevan dengan peningkatan HLS Provinsi Jawa Barat, merupakan dampak dari program dan kegiatan di sektor pendidikan.

2.2.2.8. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup atau AHH dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, nilai AHH Daerah terus mengalami peningkatan dari 71,75 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh lima) pada tahun 2013 menjadi 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen). Namun demikian, AHH Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2019 masih berada di bawah AHH Provinsi Jawa Barat. Nilai AHH Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 disajikan serta grafik perkembangan nilai AHH Daerah tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.20 berikut ini.



Gambar 2.20 Perkembangan AHH Daerah Tahun 2013-2019 (Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020)

2.2.2.9. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera atau KPS, keluarga

sejahtera

sejahtera II atau KS-II, keluarga sejahtera II atau KS-II, keluarga sejahtera III atau KS-III, dan keluarga sejahtera III plus atau KS-III plus. Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 (dua puluh satu) indikator dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari :

- 1. pemenuhan kebutuhan dasar;
- 2. pemenuhan kebutuhan psikologi;
- 3. kebutuhan pengembangan; dan
- 4. kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.

Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I. Kelompok inilah yang kemudian menjadi bagian dari target BKKBN dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok atau pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria KS-I. Selanjutnya KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu satu atau lebih indikator pada tahapan KS-II. Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I di Daerah dalam kurun waktu 2013-2019 menurun sebesar 1% (satu persen) dari 22,99% (dua puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) pada tahun 2013 menjadi 22,60% (dua puluh dua koma enam puluh persen) pada tahun 2019. Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I di Daerah tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 2.21 berikut ini.



Gambar 2.21
Persentase Keluarga Prasejahtera dan
Keluarga Sejahtera-I di Daerah Tahun 2013-2019
(Sumber: DPPKBPPPAPM Kota Sukabumi, 2020)

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Daerah selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan daerah dalam pembangunan muncul di budaya kalangan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2016, Wayang Sukuraga telah ditetapkan sebagai kesenian khas budaya Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga terus menyelenggarakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pagelaran seni budaya agar dapat mempertahankan kesenian dan kebudayaan Daerah, juga untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Maka dari itu, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Sebagai upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat juga telah berdiri stadion olahraga Suryakencana di Jalan Pabuaran. Dalam komplek stadion olahraga Suryakencana, berdiri kokoh gedung olahraga dan lapangan sepak bola yang representatif. Keberadaan stadion ini banyak melahirkan atlet olahraga prestasi. Daerah juga banyak mengantarkan atlet olahraga prestasi ke berbagai kejuaraan olahraga

prestasi baik pada level regional Jawa Barat maupun nasional termasuk Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat dan Pekan Olahraga Nasional.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Daerah mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah:

- urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 2. urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 3. urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum konkuren baik wajib maupun urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

<u>Urusan.</u>....

Urusan wajib dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar.

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu:

- 1. urusan pendidikan;
- 2. urusan kesehatan;
- 3. urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
- 4. urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- 5. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6. urusan sosial.

1. Urusan Wajib Pendidikan

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib pendidikan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase capaian Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 fluktuatif, namun secara umum meningkat 14,5% (empat belas koma lima persen) dari 55,36% (lima puluh lima koma tiga enam persen) pada tahun 2013 menjadi 73,21% (tujuh puluh tiga koma dua puluh satu) pada tahun 2019. Persentase capaian PAUD tertinggi dicapai pada Tahun 2014 yaitu 82,49% (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan persen).

b. Angka Melek Huruf

Indikator persentase penduduk yang berusia >15 (lima belas) tahun melek huruf atau tidak buta aksara pada tahun 2013-2019 rata-rata mencapai diatas 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya 99% (sembilan puluh sembilan persen) penduduk Daerah berusia >15 (lima belas) tahun sudah tidak buta aksara.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni atau APM pada jenjang pendidikan SD di Daerah pada tahun 2019 sudah mencapai 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) artinya masih terdapat 0,5% (nol koma lima persen) anak berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah. Nilai APM pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD meningkat 19,86% (Sembilan belas koma delapan puluh enam persen) dari tahun 2015 sebesar 79,73% (tujuh puluh Sembilan koma tujuh puluh tiga persen) menjadi 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) pada tahun 2019.

APM pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di Daerah pada tahun 2019 sudah mencapai 97% (sembilan puluh tujuh persen) artinya masih terdapat 3% (tiga persen) anak berusia 13-15 tahun yang belum bersekolah SMP. Nilai APM pada jenjang pendidikan SMP meningkat 27,18% (dua puluh tujuh koma delapan belas persen) dari tahun 2015 sebesar 70,63% (delapan puluh satu koma nol enam persen) menjadi 97% (sembilan puluh enam koma empat persen) pada tahun 2019.

Pada tahun 2017, urusan pendidikan menengah atas kembali menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten/kota fokus untuk mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal atau kesetaraan. Dengan adanya alih kelola ini diharapkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

d. Angka Putus Sekolah

Pada tahun 2019, sudah tidak terdapat lagi terdapat anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun yang putus sekolah baik pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD maupun pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP.

e. Angka Kelulusan

Tingkat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP pada tahun 2019 sudah mencapai 100% (seratus persen), sedangkan Angka

kelulusan pendidikan menengah atas menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

f. Angka Melanjutkan

Persentase jumlah siswa sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI di tahun 2019 yang melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP mencapai 96,54%, (sembilan puluh enam koma lima puluh empat persen) menurun 15,03% (lima belas koma nol tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 111,57% (seratus sebelas koma lima puluh tujuh persen).

g. Guru yang Memenuhi Kualifikasi Strata-1 atau Diploma-IV

Kualitas pendidikan akan tercipta bila didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang mumpuni, hal ini dapat diliat dari persentase guru yang berkualifikasi pendidikan S-1 atau D-IV pada tahun 2019 sudah mencapai 95,67% (sembilan puluh lima koma enam puluh tujuh persen), meningkat 12,71% (dua belas koma tujuh puluh satu persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 82,96% (delapan puluh dua koma sembilan puluh enam persen).

2. Urusan Wajib Kesehatan

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib kesehatan, yaitu sebagai berikut:

a. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Daerah cenderung fluktuatif pada kurun waktu tahun 2013-2019 dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 100% (seratus persen). Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.

b. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2019 mencapai 100% (seratus persen), meningkat sebesar 7,86% (tujuh koma delapan puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 92,14% (sembilan puluh dua koma empat belas persen). Hal ini dapat dicapai berkat kerjasama yang optimal dari semua pihak terutama bidan praktek swasta, rumah sakit baik pemerintah dan swasta dan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas di dalamnya.

c. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization

Capaian cakupan kelurahan universal child immunization atau UCI pada tahun 2019 adalah 100% (seratus persen). Imunisasi merupakan langkah preventif untuk meminimalisasi terjadinya kondisi sakit pada anak. Semakin banyak kelurahan yang masuk kategori UCI maka akan semakin besar perlindungan terhadap balita dari penyakit. Strategi yang dilakukan petugas di antaranya adalah sweeping langsung terhadap anak bayi dan BALITA yang menjadi sasaran imunisasi dan digerakannya kembali masyarakat peduli imunisasi serta optimalisasi peran pengawas atau wakil supervisor atau wasor imunisasi yang terus memantau dan mengevaluasi capaian program secara rutin.

d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Selama kurun waktu tahun 2013-2019, BALITA yang mengalami gizi buruk *Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan seluruhnya mendapatkan penanganan sesuai standar yaitu 100% (seratus persen).

e. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), didapat dari perhitungan persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2019 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) mencapai 100% (seratus persen), orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.

f. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD selama kurun waktu 2013-2019 sudah mencapai 100% (seratus persen), artinya keseluruhan penderita DBD yang ditemukan mencapatkan penanganan sesuai standar.

g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pada tahun 2019, persentase masyarakat miskin yang berkunjung ke sarana kesehatan strata 1 mencapai 100% (seratus persen).

h. Cakupan Kunjungan Bayi

Kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi yang mendapat pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali pada usia 29 hari-2 bulan, 1 (satu) kali pada usia 3-5 bulan, 1 (satu) kali pada usia 6-8 bulan, dan 1 (satu) kali pada usia 9-11 bulan sesuai standar. Cakupan ini untuk mengetahui efektivitas, continum of care, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang mendapat pelayanan minimal 4 (empat) kali dengan jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi tahun 2019 sebesar 100% (seratus persen). Peningkatan pencapaian ini disebabkan oleh sinergitas, koordinasi, dan pencapaian program yang sudah semakin baik sehingga berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan kunjungan bayi.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu sebagai berikut:

a. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik

Ketersediaan infratruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Daerah pada tahun 2019 adalah 85,26 (delapan puluh lima koma dua puluh

enam persen) km atau sebesar 85,26 (delapan puluh lima koma dua puluh enam persen) dari keseluruhan panjang jaringan jalan di Daerah yaitu 115,74% (seratus lima belas koma tujuh puluh empat persen), meningkat 1,20% (dua koma enam persen) dari capaian tahun 2018.

b. Rumah Tangga Bersanitasi

Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi di Daerah pada tahun 2019 berjumlah 89.590 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) unit rumah dari total 105.927 (seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) unit rumah atau sebesar 83,23% (Delapan puluh tiga koma dua puluh tiga persen). Capaian rumah tangga bersanitasi pada tahun 2019 menurun 1,34% (satu koma tiga puluh empat persen) dari capaian tahun 2018. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurangkurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi yaitu:

- 1) fasilitas air bersih;
- 2) pembuangan tinja;
- 3) pembuangan air limbah; dan
- 4) pembuangan sampah.

Penurunan kinerja yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Daerah masih belum memenuhi aspek dasar yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui bantuan penyediaan MCK dan septic tank komunal terutama di kawasan kampung yang kumuh.

c. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh yang masih ada di Daerah pada *tahun* 2019 adalah seluas 1,1367 km² (satu koma seribu tiga ratus enam puluh tujuh) km² dari total wilayah Daerah atau sebesar 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen). Persentase kawasan kumuh di Daerah terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan program pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

d. Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Daerah tahun 2019 adalah 47,28Ha (empat puluh tujuh koma dua puluh delapan) Ha dari 48,00231 luas wilayah Daerah atau sebesar 0,98% (nol koma sembilan puluh delapan persen), meningkat 15,51% (lima belas koma lima puluh satu persen) dari capaian tahun 2018 sebesar 31,77% (tiga puluh satu koma tujuh puluh tujuh persen).

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib perumahan rakyat dan pemukiman, yaitu sebagai berikut:

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga di Daerah yang menggunakan air bersih pada tahun 2019 adalah sebanyak 91.519 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan belas) kepala keluarga dari total 109.963 (seratus Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) kepala keluarga atau sebesar 83,23% (delapan puluh tiga koma dua puluh tiga persen). Capaian ini menurun sebesar 3,16% (tiga koma enam belas persen) dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 86,39% (delapan puluh enam koma tiga puluh sembilan persen). Penurunan yang signifikan yaitu sebesar 10,93% (sepuluh koma Sembilan puluh tiga persen) terjadi apabila dibandingkan dengan capaian rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2013 yaitu sebesar 94,16% (sembilan puluh empat koma enam belas persen).

b. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kawasan kumuh yang masih ada di Daerah pada tahun 2019 adalah seluas 1,1367 km² (nol koma sembilan ribu seratus satu) km² dari total wilayah Daerah atau sebesar 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen). Persentase kawasan kumuh di Daerah terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan program pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

c. Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni di Daerah pada tahun 2019 adalah sejumlah 100.687 (seratus ribu enam ratus delapan puluh tujuh) unit rumah atau sebesar 97,42% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua persen) dari total jumlah unit rumah di Daerah sebesar

103.353 (seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga) unit. Kondisi rumah layak huni di Daerah terus meningkat setiap tahun dengan persentase peningkatan sebesar 4,21% (empat koma dua puluh satu persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 93,21% (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu persen).

5. Urusan Sosial

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib sosial, yaitu sebagai berikut:

a. Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak Potensial yang telah menerima jaminan sosial

Pada tahun 2018, jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah 1.215 (seribu dua ratus lima belas) orang atau sebesar 73,99% (tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yaitu sebesar 1.642 (seribu enam ratus empat puluh dua) orang. Capaian tahun 2018 menurun 20% (dua puluh persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 92,68% (sembilan puluh dua koma enam puluh delapan persen), namun demikian, upaya peningkatan pelayanan sosial terus ditingkatkan.

b. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Daerah pada tahun 2018 adalah 19 (sembilan belas) unit, menurun sebanyak 8 (delapan) unit dari capaian tahun 2017 yang mencapai 27 (dua puluh tujuh) unit.

c. Jumlah PPKS yang mendapat bantuan di Daerah pada tahun 2018 adalah sejumlah 54.426 (lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam) orang dari total penyandang PPKS yaitu 99.240 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh) orang atau sebesar 54,84% (lima puluh empat koma delapan puluh empat persen). Capaian pada tahun 2018 meningkat

sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 41,78% (empat puluh satu koma tujuh puluh delapan persen).

d. Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

Jumlah korban bencana alam dan sosial sebanyak 62 (enam puluh dua) orang pada tahun 2019. Dari sebanyak 62 (enam puluh dua) orang korban bencana tercapai sebesar 100% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya setelah tanggap darurat bencana di Daerah

e. Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarganya pada tahun 2019 mencapai 100%, dari sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) telah direunifikasi dengan keluarganya

f. Pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan

Dari jumlah pekerja sosial profesional dan atau tenaga kerja sosial dan atau relawan sosial yang ada di Daerah, 50 (lima puluh) orang atau 140% (seratus empat puluh persen) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina.

2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Terdapat 17 (tujuh belas) jenis urusan wajib non pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

- 1. urusan lingkungan hidup;
- 2. urusan kepemudaan dan olah raga;
- 3. urusan penanaman modal;
- 4. urusan koperasi dan UKM;
- 5. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- 6. urusan tenaga kerja;
- 7. urusan pangan;
- 8. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau KB;
- 10. urusan perhubungan;
- 11. urusan komunikasi dan informatika;
- 12. urusan pertanahan;
- 13. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 14. urusan budaya;
- 15. urusan statistik;
- 16. urusan kearsipan; dan
- 17. urusan perpustakaan.

1. Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, terdapat 4 (empat) indikator yaitu sebagai berikut:

a. Terlaksananya pengelolaan sampah di Daerah

Penanganan sampah pada tahun 2019 adalah 329.139 (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan) m³ atau sebesar 88,67% (delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh persen) dari 371.178 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan) m³ sampah yang diproduksi. Capaian pada tahun 2019 meningkat 7,06% (tujuh koma nol enam persen) dari capaian tahun 2013

b. Kebersihan

Indikator kebersihan diperoleh dari kondisi kebersihan pasar tradisional di Daerah yang memenuhi kriteria Adipura yang capaiannya selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu 2013–2018, artinya 5 (lima) pasar tradisional di Daerah memenuhi kriteria Adipura.

c. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Daya tampung TPS terhadap keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 438,75 (empat ratus tiga puluh delapan

koma tujuh puluh lima) m³ permil. Kondisi ini menurun 25% (dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2017.

d. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Daerah sudah berjalan baik dengan capaian rata-rata tahun 2013-2018 adalah 100% (seratus persen). Pada tahun 2018 terdapat 6 (enam) kasus permasalahan lingkungan dan seluruhnya dapat ditangani.

e. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Dari semua usaha/ kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 berupa pemeriksaan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 30 (tiga puluh) usaha/ kegiatan yang dilaksanakan taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah gelanggang olahraga yang terdapat di Daerah adalah 2 (dua) unit atau sebesar 0,0058% (nol koma nol nol lima puluh delapan persen). Kondisi ini sebenarnya sama setiap tahun dengan jumlah gelanggang atau balai remaja yang ada yaitu 2 (dua) unit, namun yang membedakan adalah peningkatan jumlah penduduk sehingga cakupan pelayanan dari gelanggang atau balai remaja tersebut mengalami penurunan.
- b. Jumlah lapangan olahraga yang terdapat di Daerah pada tahun 2018 mencapai 252 (dua ratus lima puluh dua) unit atau dengan kata lain cakupan pelayanannya terhadap jumlah penduduk Daerah adalah 0,73% (nol koma tujuh puluh tiga persen), meningkat secara signifikan dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 113,33% (seratus tiga belas koma tiga puluh tiga persen) namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 menurun sebesar 23% (dua puluh tiga persen).
- c. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Sebany	ak						
OCDAIL	an		 	•	_	_	

Sebanyak 109.355 (seratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima) pemuda (umur 16-30 tahun) di Daerah sebesar 0,23% (nol koma dua puluh tiga persen) atau sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang berwirausaha di Daerah.

- d. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan capaian sebesar 1,16% (satu koma enam belas persen) merupakan pemuda berumur 16-30 tahun di Daerah sebanyak 109.355 pada tahun 2019 sebanyak 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) yang aktif menjadi anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
- e. Peningkatan prestasi olahraga

 Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2019 Daerah mendapatkan 27 medali dari 12 cabang olah raga
- f. Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan

 Dari 156 (seratus lima puluh enam) jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya memiliki Kompetensi 88 (delapan puluh delapan) jumlah Pelatih Olah Raga telah memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan, indikator ini dengan capaian sebesar 56,41% (lima puluh enam koma empat puluh satu persen) di tahun 2019.

3. Urusan Penanaman Modal

Indikator pada urusan penanaman modal adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Pada tahun 2019, nilai PMDN mencapai Rp. 11.471.248,900,000,- (sebelas trilyun empat ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan persentase kenaikan sebesar 27,52% (dua puluh tujuh koma lima puluh dua persen dari tahun 2013. Adapun capaian pada tahun 2013 mencapai 11,40 % (sebelas koma empat puluh persen).

4. Urusan Koperasi dan UKM

a. Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2019 cenderung fluktuatif dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 61,45% (enam puluh satu koma empat puluh lima persen), secara umum meningkat sebesar 4,06% (empat koma nol enam persen) dari tahun 2013.

b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Persentase usaha mikro dan kecil di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 cenderung fluktuatif dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 85,66% (delapan puluh lima koma enam puluh enam persen), secara umum meningkat sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari tahun 2013. Persentase usaha mikro dan kecil tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 86,68% (delapan puluh enam koma enam puluh delapan persen) dan capaian terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 32,64% (tiga puluh dua koma enam puluh empat persen).

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Kepemilikan KTP

Cakupan kepemilikan KTP di Daerah telah mencapai 100% (seratus persen) pada tahun 2019, meningkat sebesar 17,84% (tujuh belas koma delapan empat persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 82,16% (delapan puluh dua koma enam belas persen).

b. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 (seribu) penduduk pada tahun 2019 dengan capaian 97,64% (Sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat persen) dari 110.881 Jumlah penduduk, usia 0 – 18 tahun 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran 2018

6. Urusan Tenaga Kerja

a. Pelayanan Kepersertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja atau Buruh

Persentase pekerja atau buruh yang mendapat kepersertaaan jaminan sosial pada tahun 2018 mencapai 98% (sembilan puluh

delapan

delapan persen), meningkat secara signifikan sebesar 101% (seratus satu persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 48,56% (empat puluh delapan koma lima puluh enam persen).

b. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan di Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian pada tahun 2018 adalah 94,71% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh satu persen) meningkat secara signifikan sebesar 214,33% (dua ratus empat belas koma tiga puluh tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu 30,13% (tiga puluh koma tiga belas persen).

c. Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam Daerah

Sejumlah 5.239 (lima ribu dua ratus tiga puluh Sembilan) orang pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019 dari Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 5.312 (lima ribu tiga ratus dua belas) dengan capaian penyerapan sebesar 98.62% (Sembilan puluh delapan koma enam puluh dua persen)

d. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial

Sebanyak 20 (dua puluh) di tahun 2019 kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator Hubungan Industrial dengan capaian 100% (seratus persen) dengan melibatkan tripartite

7. Urusan Pangan

a. Regulasi Ketahanan Pangan

Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) regulasi ketahanan pangan yaitu Keputusan Wali Kota Nomor 228 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

b. Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)

Jumlah cadangan pangan Daerah pada tahun 2019 Daerah untuk beras dan jagung sebanyak 69.748.000 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu) kg dari 33.928.000 (tiga

puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu) kg jumlah kebutuhan pangan masyarakat Daerah dengan capaian sebesar 205,58 % (dua ratus lima koma lima puluh delapan persen ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 mencapai 15% (lima belas persen). Kondisi ini secara umum meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 9,57% (sembilan koma lima puluh tujuh persen) namun lebih rendah dari capaian tahun 2017 sebesar 27,03% (dua puluh tujuh koma nol tiga persen).

b. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 (lima belas) Tahun ke Atas

Penduduk perempuan berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah sudah melek huruf dengan capaian tahun 2014-2018 sebesar rata-rata 100% (seratus persen) meningkat 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2013.

c. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 (lima belas) Tahun ke Atas

Penduduk perempuan berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah sudah melek huruf dengan capaian tahun 2014-2018 sebesar rata-rata 100% (seratus persen) meningkat 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2013.

d. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota

Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi di Daerah pada tahun 2019 sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) anak atau dengan capaian 0,02 % (nol koma nol dua persen) dari Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) di Daerah

e. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Perempuan yang mengalami kekerasan di Daerah pada tahun 2019 sebanyak 31 (tiga puluh satu) per 100.000 jumlah penduduk

perempuan dengan rasio kekerasan terhadap perempuan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen)

9. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau KB

a. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluhan Keluarga Berencana di Setiap Kelurahan

Rasio petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB dan penyuluhan keluarga berencana atau PKB di setiap kelurahan pada tahun 2018 mencapai 173,68 (seratus tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan), sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017.

b. Prevalensi Peserta KB Aktif

Prevalensi peserta KB aktif di Daerah tahun 2018 sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan pasangan usia subur. Kondisi ini menurun secara umum apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu 78,53% (tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga persen) dengan tingkat penurunan sebesar 4,4% (empat koma empat persen) namun meningkat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 74,4% (tujuh puluh empat koma empat persen).

c. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Jumlah peserta KB Aktif Modern di Daerah pada tahun 2019 sebesar 43.142 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua) peserta dari jumlah usia subur sebesar 57.695 (lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh lima) peserta dengan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern sebesar 74,77% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh tujuh persen)

d. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam) jumlah PUS
yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani dari 57.695 (lima puluh
tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh lima) jumlah yang harus
terlayani pasangan usia subur. Persentase kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi sebesar 9,61% (Sembilan koma enam puluh satu persen)

10. Urusan Perhubungan

- a. Cakupan pelayanan angkutan darat di Daerah adalah 43,48% (empat puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dimana terdapat 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua) angkutan darat untuk melayani 4.812 (empat ribu delapan ratus dua belas) orang penumpang angkutan darat. Kondisi ini meningkat sebesar 17,45% (tujuh belas koma empat puluh lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 37,02% (tiga puluh tujuh koma nol dua persen).
- b. Indikator Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)

Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap di tahun 2019 sepanjang 98,68 KM² (sembilan puluh delapan koma enam puluh delapan) dibanding panjang seluruh jalan di daerah 115,74 KM² (seratus lima belas koma tujuh puluh empat), dengan persentase capaian sebesar 85,26% (delapan puluh lima koma dua puluh enam persen)

11. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Laman Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sudah memiliki laman resmi yaitu www.sukabumikota.go.id. Laman ini berisi informasi tentang Pemerintah Daerah.

b. Pameran atau *Expo*

Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah mengadakan 16 (enam belas) kali pameran atau *expo*, capaian ini lebih kecil daripada capaian tahun 2017 yaitu sebesar 17 (tujuh belas) kali.

12. Urusan Pertanahan

a. Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemda

Luas lahan milik Pemerintah Daerah yang sudah memiliki sertifikat adalah 69% (enam puluh empat persen) yaitu seluas

1.676.886 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam) m^2 dari total luas lahan milik pemerintah seluas 2.442.301 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu) m^2 .

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Persentase penyelesaian kasus tanah negara di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2018.

c. Penyelesian Ijin Lokasi

Persentase penyelesaian izin lokasi di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2019. Artinya setiap permohonan izin lokasi di Daerah selalu terlayani.

d. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Persentase penyelesaian kasus tanah negara di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2019.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK aktif

Persentase PKK aktif di Daerah sudah mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu 2015-2019, meningkat secara umum dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 85,14% (delapan puluh lima koma empat belas persen).

b. Posyandu

Persentase Posyandu aktif di Daerah sudah mencapai 100% (seratus persen) pada tahun 2019 sebesar 453 (empat ratus lima puluh tiga) posyandu aktif yang merupakan jumlah total posyandu yang ada dengan capaian 100% (seratus persen).

14. Urusan Budaya

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah 4 (empat) kali, meningkat sebesar 55,5% (lima

puluh lima koma lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 9 (sembilan) kali per tahun.

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Di Daerah terdapat 31 (tiga puluh satu) sarana penyelenggaraan seni dan budaya, meningkat signifikan sebesar 520% (lima ratus dua puluh persen) secara umum dari capaian tahun 2013 yaitu 5 (lima) buah. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya paling banyak terdapat pada tahun 2015 yaitu 59 (lima puluh sembilan) buah.

c. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Di Daerah terdapat 12 (dua belas) benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari 18 (delapan belas) benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada atau dengan kata lain capaiannya sebesar 67% (enam puluh tujuh persen). Secara umum kondisi ini meningkat 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 60% (enam puluh persen).

15. Urusan Statistik

Terdapat 2 (dua) indikator kunci dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu adanya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota. Setiap tahun, BPS menerbitkan Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota.

16. Urusan Kearsipan

a. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku . Capaian untuk pengelolaan arsip tahun 2019 juga dengan capaian sebesar 100% (seratus persen). Penerapan pengelolaan arsip secara baku meningkat setiap tahun dengan persentase peningkatan 233,33% (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu 30% (tiga puluh persen).

b. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan

Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM pengelola kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 6 (enam) kali, meningkat 500% (lima ratus persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 1 (satu) kali.

c. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban

Beberapa faktor agar tersedianya arsip sebagai bahan alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban antara lain: persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN. Daerah pada tahun 2019 memenuhi kategori hal tersebut dengan capaian sebesar 50,8% (lima puluh koma delapan persen)

17. Urusan Perpustakaan

a. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2019 mencapai 93,36% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam persen) meningkat 118,89% (seratus delapan belas koma delapan puluh sembilan persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 42,65% (empat puluh dua koma enam puluh lima persen).

b. Pengunjung Perpustakaan

Persentase pengunjung perpustakan Daerah pada tahun 2018 mencapai 98,82% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen) meningkat 154,75% (seratus lima puluh empat koma tujuh puluh lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 37,79% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan persen)

c. Nilai Budaya Baca

Jumlah pengunjung adanya kenaikan dari dari Tahun 2018 sebesar 181.030 orang dan pada Tahun 2019 sebesar 188.047 orang, dinas perpustakaan terus berupaya melakukan kegiatan sosialisasi

promosi

promosi, pembinaan kepada masyarakat, sekolah- sekolah untuk meningkatkan gemar membaca mulai dari usia dini. Kebiasaan membaca dengan capaian Daerah yang masih sebesar 2,90% (dua koma Sembilan puluh persen) Daerah terus berusaha agar minat baca ini terasah sejak dini melalui Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengadakan Festival literasi lomba meriu buku siswa dan guru, jambore literasi budaya baca dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Guru pendamping dari sekolah sekolah

2.3.2. Urusan Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Daerah melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Daerah tahun 2018 adalah sebesar 85,42% (delapan puluh lima koma empat puluh dua persen) menurun sebesar 1,94% (satu koma sembilan puluh empat persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 87,36% (delapan puluh tujuh koma tiga puluh enam persen).

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Daerah sudah mencapai 160,42% (seratus enam puluh koma empat puluh dua persen) meningkat 105,66% (seratus lima koma enam puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).

c. Jumlah Total Produksi Perikanan

Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Daerah pada tahun 2019 sebanyak 1366.27 ton

2. Urusan Pilihan Pertanian

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi di Daerah mencapai 7,03 (tujuh koma nol tiga) ton/ha pada tahun 2018. Capaian produktivitas padi di Daerah sangat fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dikarenakan besarnya pengaruh dari dampak perubahan iklim atau DPI. Secara umum provitas tanaman padi meningkat 8,8% (delapan koma delapan persen) dari capaian provitas padi tahun 2013 yaitu 6,46 (enam koma enam puluh empat) ton/ha. Capaian provitas tanaman padi tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) ton/ha

b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi pertanian terhadap PDRB juga terus menurun dalam kurun waktu tahun 2013-2019 walaupun sempat meningkat pada tahun 2015. Hal ini disebabkan perhitungan kontribusi pertanian terhadap PDRB dilihat dari sektor *on farm* dimana produksi pertanian cenderung menurun sejalan dengan berkurangnya luas lahan pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2019 mencapai 3,50% (tiga koma lima puluh persen). walaupun nilai ini cenderung masih kecil dibandingkan sektor PDRB lainnya terhadap pendapatan perkapita, dengan lahan pertanian terbatas Pemerintah Daerah terus berusaha mendukung sektor pertanian melalui kebijakan agar lahan pertanian di Daerah tidak alih fungsi

c. Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Pertanian dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan serta Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Daerah dengan luas panen 3.755 ha untuk pertanian, di tahun 2019 produksi pertanian pangan per hektar per tahun sebanyak 22.726 ton per tahun dengan produktivitas pertanian per hektar per tahun sebesar 6.052 ton/ha.

3. Urusan Pariwisata

a. Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan di Daerah pada tahun 2018 mencapai 188.928 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang, pencapaian ini secara umum meningkat sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari kunjungan wisatawan tahun 2013 sebesar 141.000 (seratus empat puluh satu ribu) orang. Namun demikin jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 menurun sebesar 23.785 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) orang atau sebesar 11,18% (sebelas koma delapan belas persen) dari jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebesar 212.713 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga belas) orang. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Daerah didorong dengan peningkatan akses transportasi dengan beroperasinya kembali moda transportasi kereta api .

b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 2015-2019 dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 2,93%.

c. Tingkat hunian akomodasi

Kunjungan wisatawan di Daerah pada tahun 2019 yang berkunjung, singgah dan inap merupakan potensi bagi PAD, kontribusi para wisatawan didalam sewa inap kamar, dari jumlah kamar yang tersedia 14.868 kamar di Daerah kamar yang terjual sebanyak 682,32% (enam delapan dua koma tiga puluh dua persen) atau 101.448 kamar telah terjual.

4. Urusan Perindustrian

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Daerah cenderung mengalami penurunan Pertumbuhan Industri di Kota Sukabumi Tahun 2019 sebesar 0,55% yang disebabkan oleh masih banyaknya Industri Kecil Menengah yang berproduksi secara musiman dengan capaian pada tahun 2019. Menurunnya kontribusi

sektor industri terhadap PDRB Daerah sejalan dengan turunnya pertumbuhan industri di Daerah.

b. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Daerah cederung mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dengan capaian tahun 2018 adalah 1,58% (satu koma lima puluh delapan persen) menurun sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) dari pertumbuhan industri tahun 2013 yaitu sebesar 5,98% (lima koma sembilan puluh delapan persen).

5. Urusan Perdagangan

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Daerah terus menurun dalam kurun waktu tahun 2013-2019 dengan capaian tahun 2019 sebesar 38,92% (tiga puluh delapan koma Sembilan puluh dua persen) menurun 6,78% (enam koma tujuh puluh delapan persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 45,7% (empat puluh lima koma tujuh persen).

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yang dapat dilihat dari indikator nilai ekspor bersih perdagangan dalam US \$.

6. Urusan Transmigrasi

Persentase transmigran swakarsa atau peserta transmigrasi dengan keinginan sendiri selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2019.

Capaian indikator kinerja kunci Daerah tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Tahun 2013-2019

					Tahun			
No.	IKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.	Urusan Wajib Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); %	55,36	82,49	62,94	80,02	67,72	63,4	73,21
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); %	99,74	99,76	100	100	100	99,61	100
3	APM(APM) SD/MI/Paket A; %	94,33	84,75	76,07	96,38	96,75	99,4	99,5
4	APM(APM) SMP/MTs/Paket B; %	81,06	71,29	70,63	96,13	96,5	96,4	97
5	APM(APM) SMA/SMK/MA/Paket C; %	100,77	73,89	62,34	97,85			
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; %	0	0	0	0,01	0,003	0	0
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; %	0,29	0,23	0,02	0,13	0,07	0	0
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA; %	0,72	0,16	0,2	0,04			
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI; %	100	100	100	100	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; %	99,98	100	100	100	100	100	100
11	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA; %	100	100	99,7	100			
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; %	111,57	109,82	107,57	115,37	112,4	110,2	96,54
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; %	121,13	121,43	131,48	134,37	N/A	N/A	N/A

<u>No.</u>

NT -	IKK	Tahun								
No.	IKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; %	82,96	27,63	88,57	90,53	92	93	95,67		
2.	Urusan Wajib Kesehatan									
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; %	100	98,63	95,98	97,25	96,13	100	100		
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; %	92,14	93,65	98,3	98,97	96,84	97.9	100		
3	Cakupan kelurahan <i>Universal Child</i> <i>Immunization</i> (UCI); %	75,76	96,97	100	93,94	100	96.97	100		
4	Cakupan BALITA gizi buruk mendapat perawatan; %	100	100	100	100	100	100	100		
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; %	91,15	85,25	92,04	100	116,1	144.82	100		
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; %	100	100	100	100	100	100	100		
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; %	100	73,43	95,14	69,02	103,3	100	100		
8	Cakupan kunjungan bayi; %	71,86	92,18	96,95	93,99	97,43	97,83	100		
3.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan	Ruang								
1	Panjang jalan kota dalam kondisi baik; %	64,16	93,93	98,23	81,94	79,25	84,06	85,26		
2	Rumah tangga bersanitasi; %	95,87	69,71	86,94	89,84	92,78	84,57	83,23		
3	Kawasan kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89	1,89		
4	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; %	2,93	79,87	23	31,7	32	31,77	47,28		

N.	11717	Tahun								
No.	IKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukim	an								
1	Rumah tangga pengguna air bersih; %	94,16	92,64	84,2	85,97	94,21	86,39	83,23		
2	Lingkungan pemukiman kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89	1,89		
3	Rumah layak huni; %	93,21	95,51	95,51	95,98	95,98	97,04	97,42		
5. T	Jrusan Sosial									
1	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; %	N/A	1,52	5,08	17,1	92,68	73,99	N/A		
2	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi; buah	18	19	19	27	27	19	N/A		
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; %	11,14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	PMKS yang memperoleh bantuan sosial; %	148,17	16,18	36,99	59,03	41,78	54,84	N/A		
5	Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		
6	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		
7	Pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	140		

N.	IKK				Tahun			
No.	IKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASA	R						
1.	Urusan Lingkungan Hidup							
1	Penanganan sampah; %	81,61	84,52	83,65	81,86	84,04	88,2	88,67
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal; %	36,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Kebersihan; %	N/A	50	100	100	100	100	N/A
4	Tempat pembuangan sampah atau TPS per satuan penduduk; TPS/mil	2,18	0,12	3,73	592,79	584,19	438,75	N/A
5	Penegakan hukum lingkungan ; %	100	100	100	100	100	100	N/A
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
2. T	Jrusan Kepemudaan dan Olah raga							
1	Gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta); permil	0,0056	0	0,006	0,006	0,006	0,0058	N/A
2	Lapangan olahraga; permil	0,3904	32,28	0,15	0,21	0,29	0,73	N/A
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,16
4	Peningkatan prestasi olahraga; Medali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27
5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	56,41

N.	IKK				Tahun			
No.	IKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3. T	Jrusan Penanaman Modal							
1	Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah); %	11,4	85,14	182,39	-66, 24	30,63	280,43	38,92
4. T	Jrusan Koperasi dan UKM							
1	Koperasi aktif; %	57,39	61,38	44,56	60,71	61,15	61,23	61,45
2	Usaha mikro dan kecil; %	81,92	32,64	86,68	85,43	85,53	85,66	
5. T	Jrusan Administrasi Kependudukan dan C	atatan Sipil						
1	Kepemilikan KTP; %	82,16	89,93	92,72	94,46	91,12	99,08	100
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; %	922,9	923	922,57	925,27	504,24	513,7	97,64
6. T	Jrusan Tenaga Kerja							
1	Pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh;%	N/A	48,56	48,59	54,5	49,88	98	N/A
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja; %	66,41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Pencari kerja yang ditempatkan; %	30,13	80,01	81,02	86,02	89,39	94,71	98,62
4	Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
7 . (Jrusan Pangan							
1	Regulasi ketahanan pangan; buah	5	Ada	Ada	Ada	1	1	N/A
2	Ketersediaan pangan utama; ton	239.265,27	382,29	237.707,26	210.505,96	210.517,80	190.201,77	N/A

NT -	IKK				Tahun			
No.	IKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8. T	Trusan Pemberdayaan Perempuan dan Per	lindungan An	nak					
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; %	9,57	15,42	17,95	27,03	27,03	15	N/A
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas; %	99,09	100	100	100	100	100	N/A
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan; %	34,05	35,56	59,36	35,82	34,52	59,14	N/A
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02
9. T	Jrusan Pengendalian Penduduk dan KB							
1	Rasio petugas lapangan KB atau PLKB dan penyuluhan KB atau PKB di setiap kelurahan; %	N/A	1,83	1,74	0,94	173,68	173,68	N/A
2	Prevalensi peserta KB aktif; %	78,53	72,6	73,57	73,2	74,4	75	N/A
3	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I; %	23,03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,77
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,61
10. U	rusan Perhubungan							
1	Angkutan darat; %	37,02	2,27	48,93	31,82	43,48	43,48	N/A

<u>No.</u>

3 7 -	IKK				Tahun			
No.	IKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,26
11. U	rusan Komunikasi dan Informatika							
1	Web site milik pemerintah daerah; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran atau <i>expo</i> ; kali	2	4	21	16	17	16	N/A
12. T	Jrusan Pertanahan							
1	Luas lahan bersertifikat milik Pemda; %	68,66	57,59	57,23	56,54	60,19	64	69
2	Penyelesaian kasus tanah negara; %	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesian ijin lokasi; %	100	100	100	100	100	100	100
4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100	100	100
13. U	rusan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	PKK aktif; %	85,14	88,72	100	100	100	100	100
2	Posyandu;%	100	92,73	100	100	100	100	100
14. U	rusan Budaya							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya; kali	9	5	7	6	10	10	4
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya; buah	5	2	59	51	31	31	N/A
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; %	60	0	100	100	67	67	N/A
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48,24
15. U	rusan Statistik							
1	Buku "Kota dalam angka"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kota"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

<u>No.</u>

37 -	*****				Tahun			
No.	IKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
16. U	rusan Kearsipan				-	-	-	
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku; %	30	84,38	100	87,5	87,88	100	100
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan; kali	1	1	2	4	6	6	N/A
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,8
17. U	rusan Perpustakaan							
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;%	42,65	20,94	20,94	94,85	94,84	93,36	93,36
2	Pengunjung perpustakaan; %	38,79	34,72	55,39	95,6	92,21	98,82	N/A
3	Nilai Budaya Baca; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,9
C. T	JRUSAN PILIHAN							
1. T	Jrusan Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan; %	87,36	102,01	102,63	103,81	85,21	85,42	N/A
2	Konsumsi ikan; %	78	100	97,16	100,79	164,32	160,42	N/A
3	Jumlah Total Produksi Perikanan ; %	87,36	102,01	102,63	103,81	85,21	85,42	N/A
2. T	Jrusan Pertanian							
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; ton/ha	6,46	6,41	7,47	7,69	6,12	7,03	N/A
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; %	3,6	3,25	4	3,94	3,82	3,59	3,5

No.	IKK				Tahun					
NO.	mx	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun; ton/ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.052		
3.	3. Urusan Pariwisata									
1	Kunjungan wisatawan; orang	141.000	86.431	127.235	116.790	212.713	188.928	N/A		
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; %	0,1	47,7979	2,7181	2,7693	2,84	2,9	2,93		
3	Tingkat hunian akomodasi; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	628,32		
4.	Urusan Industri									
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; %	5,48	5,1362	5,4212	5,1973	5,14	5,11	N/A		
2	Pertumbuhan Industri ; %	5,98	2,3695	1,886	2,0194	2,02	1,58	N/A		
5. 1	Urusan Perdagangan									
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; %	45,7	42,97	41,109	40,0577	39,41	39,09	38,92		
2	Ekspor Bersih Perdagangan; US\$	-227.363.676	-1.536.953	-9.787.652.700	-1.908.889.300	1.298.244	1.965.131	N/A		
6. U	Jrusan Transmigrasi							_		
1	Transmigran swakarsa ; %	100	100	100	100	100	100	100		

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kota Sukabumi

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB ADHB Daerah terus menunjukan pertumbuhan, pada tahun 2013 PDRB ADHB Daerah masih berada pada angka Rp.7.300.000.000.000,- (tujuh trilyun tiga ratus milyar rupiah) dan terus meningkat hingga menjadi Rp. 12.300.000.000.000,- (dua belas trilyun tiga ratus milyar rupiah) pada tahun 2019. Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11
Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2019

No	Tahun	PDRB ADHB (dalam jutaan rupiah)
1	2013	7.309.646,73
2	2014	8.140.751,03
3	2015	8.971.328,27
4	2016	9 718 687.89
5	2017	10 549 217.87
6	2018	11 471 248.90
7	2019	12 384 001.28

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020

Dilihat dari segi kewilayahan, Daerah saat ini masih memiliki potensi di wilayah-wilayah pengembangan yang dapat difungsikan sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam peningkatan industri, pelayanan jasa, dan perdagangan komoditas pertanian guna mewujudkan kemandirian pangan. Potensi yang terdapat pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menunjukkan semakin besarnya peluang untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, mulai dari budidaya, agroindustri, dan pengembangan pemasarannya, sejalan dengan perkembangan penduduk dan perkembangan kota.

Potensi sektor industri di Daerah secara umum belum banyak memberikan kontribusi pada perekonomian Daerah. Namun dalam hal penyerapan tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor ini cukup penting dan masih bisa ditingkatkan. Selain perusahaan industri besar dan sedang yang secara reguler paling banyak menyerap tenaga kerja yang antara lain adalah industri tekstil dan pakaian jadi, serta berbagai jenis industri menengah dan kecil, akhir-akhir ini telah muncul kelompok baru yang dikenal dengan sektor industri kreatif yang dapat menjadi alternatif dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di Daerah ke depan.

Pada sektor industri menengah, kecil, dan mikro nonformal sebagaimana pada umumnya di berbagai daerah, membutuhkan pembenahan dan pengelolaan yang serius. Mengingat peran sektor ini makin meningkat dari sisi jumlah maupun volume usaha, di samping sebagai alternatif penyerapan tenaga kerja yang dapat diandalkan pada saat aktivitas sektor formal melemah.

Potensi yang cukup besar ada di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang menjadi kontributor utama pada tahun 2016. Pengembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran akan perkembangan sektor berdampak pada pariwisata, karena merupakan sektor pendukungnya. Peluang pengembangan sektor depan akan semakin besar sejalan pariwisata ke perkembangan kota dan rencana pengembangan jaringan jalan, antara lain rencana pembangunan jalan tol Ciawi-Padalarang yang melintasi Wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Potensi lainnya adalah di sektor perdagangan nonformal, yang terdiri atas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kelompok usaha atau jasa lainnya, mencakup pedagang keliling, warung makanan atau sembako, dan jasa layanan publik. Sektor ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan telah terbukti tahan terhadap guncangan krisis.

Sementara itu, sektor yang mengalami laju pertumbuhan negatif adalah pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, terutama pada subsektor tanaman bahan makanan. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh negatif. Dengan demikian, fokus pembangunan ekonomi Daerah, seyogyanya disebutkan diarahkan pada sektor-sektor jasa telah yang sebelumnya, tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya sebagai penunjang.

Dilihat dari basis ekonomi atau economic base, Daerah memiliki sejumlah sektor basis, yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Hal ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi terhadap setiap sektor, dan memilih sektor mana di Daerah yang akan dijadikan sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonominya.

Struktur ekonomi yang ditunjukkan dari PDRB Daerah pada tahun 2019, didominasi oleh sektor tersier, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling dominan dan memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Daerah, mencapai 38,64% .(tiga puluh delapan koma enam puluh empat persen) pada tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa corak perekonomian yang ada di Daerah lebih mengarah pada sektor jasa dan perdagangan besar, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,71% (sepuluh koma tujuh puluh satu persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,95% (sepuluh koma sebilan puluh lima persen), Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor tersier mengungguli sedangkan sektor primer dan sekunder Pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sektor yang terus mengalami pelambatan pada enam tahun terakhir .Struktur ekonomi Daerah

menurut kelompok sektor atas dasar harga berlaku tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12 Struktur Ekonomi Daerah Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013–2019 (Persen)

No	Kelompok Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sektor Primer	4,06	4,00	3,93	3,82	3,60	3,50	3,43
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,06	4,00	3,93	3,82	3,60	3,50	3,43
	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Sektor Sekunder	12,05	11,15	12,13	12,19	12.23	12.36	12.46
	Industri Pengolahan	5,58	5,42	5,23	5,19	5,11	5,11	5,08
	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,22	0,21
	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
	Konstruksi	6,16	6,51	6,61	6,66	6,77	6,90	7,05
3	Sektor Tersier	83,89	84,85	83,94	84,00	84,17	84,15	84,10
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	41,81	41,11	40,03	39,39	39,12	38,92	38,64
	Transportasi dan Pergudangan	9,31	9,82	10,60	10,70	10,60	10,83	10,77
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,54	2,72	2,77	2,84	2,90	2,93	3,02
	Informasi & Komunikasi	3,52	3,60	3,58	3,72	3,79	3,75	3,77
	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,17	9,94	10,29	10,66	10,94	10,94	10,95
	Real Estate	1,12	1,11	1,12	1,11	1,12	1,13	1,14
	Jasa Perusahaan	1,54	1,65	1,66	1,68	1,70	1,65	1,79
	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,25	5,83	5,71	5,50	5,24	5,13	4,87
	Jasa Pendidikan	3,38	3,63	3,77	3,82	4,00	3,99	4,11
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,63	1,68	1,73	1,77	1,76	1,82
	Jasa Lainnya	2,73	2,71	2,72	2,85	2,99	3,12	3,22

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020

Selain itu, sejak tahun 2013 terdapat pola penurunan kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Daerah dari rata-

<u>rata</u>

rata 4% (empat persen) menjadi hanya sekitar 3% (tiga persen). Penurunan kontribusi sektor primer pada perekonomian Daerah sepenuhnya disumbangkan oleh penurunan persentase sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada sektor sekunder, yang mengalami penurunan secara persisten sejak tahun 2013 adalah sektor industri pengolahan dari awalnya sebesar 5,58% (lima koma lima delapan persen) pada tahun 2013 menjadi sebesar 5,08% (lima koma nol delapan persen) pada tahun 2019. Pada sektor tersier, sektor yang secara signifikan mengalami penurunan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Pada tahun 2013, sektor tersebut memberikan kontribusi di atas 41,81% (empat puluh satu koma delapan puluh satu persen). Walaupun sektor tersebut merupakan sektor dengan kontribusi terbesar di Daerah namun kontribusinya dari tahun ke tahun terus menurun.

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan secara persisten sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 adalah sektor kontruksi dari 6,16% (enam koma enam belas persen) pada tahun 2013 menjadi 7,05% (tujuh koma nol lima persen) pada tahun 2019, sektor transportasi dan pergudangan dari 9,31% (sembilan koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2013 menjadi 10,77% (sepuluh koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2019, dan sektor jasa perusahaan dari 1,54% (satu koma lima puluh empat persen) pada tahun 2013 menjadi 1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2019.Pertumbuhan masing-masing lapangan usaha di Daerah pada kurun waktu tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Daerah Tahun 2013-2019

NO	Kategori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,49	4,66	1,90	0,38	-0,98	1,49	2,23
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Industri Pengolahan	3,70	3,93	2,71	3,77	4,35	5.25	3,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,27	3,76	2,98	7,50	4,76	2.57	3,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	-1,03	1,91	3,62	3,10	3.83	5,60
6	Konstruksi	7,89	9,80	5,82	6,88	7,52	7.70	7,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,01	5,65	3,73	4,44	4,70	4.94	4,72
8	Transportasi dan Pergudangan	4,33	3,65	7,49	6,46	4,75	5.74	7,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,67	8,77	7,87	7,45	7,28	7.39	7,01
10	Informasi dan Komunikasi	7,45	11,67	10,13	12,41	10,35	9.62	8,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,47	2,63	7,59	8,42	6,56	5.21	5,58
12	Real Estate	2,06	5,23	5,58	6,44	7,99	7.74	8,16
13	Jasa Perusahaan	7,05	8,18	7,70	7,61	7,88	7.23	7,37
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-3,70	-3,52	1,21	1,37	0,20	0.51	0,21
15	Jasa Pendidikan	7,30	10,76	8,43	7,44	8,73	6.04	6,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,70	13,63	11,25	9,13	8,74	8.01	7,49
17	Jasa Lainnya	4,88	6,50	7,30	8,69	9,88	8.80	9,15
	PDRB ADHK (%)	5,41	5,43	5,14	5,64	5,43	5.51	5,49

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2020

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

Salah satu aspek dalam tata kelola perkotaan adalah Infrastructure and Service Management atau Infrastruktur dan Pengelolaan Pelayanan. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkotaan karena infrastruktur adalah suatu sarana yang mendukung perkembangan suatu kota, baik perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan

Penyediaan Infrastruktur, pengertian infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pengertian penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Salah satu manfaat infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian suatu kota. Kota yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur agar ekonomi daerah tersebut berkembang.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan. Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalulintas perekonomian di perkotaan. Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota, panjang jalan negara di Daerah pada tahun 2019 mencapai 8,50 (delapan koma lima nol) km, panjang jalan provinsi mencapai 33,55 (tiga puluh tiga koma lima lima) km, sementara panjang jalan Daerah mencapai 185,16 (seratus delapan puluh lima koma satu enam) km dengan rincian: sepanjang 127,05 (sertaus dua puluh tujuh koma nol lima) km memiliki kondisi jalan baik, sepanjang 66,48 (enam puluh enam koma empat delapan) km memiliki kondisi jalan sedang, sepanjang 30,10 (tiga puluh koma satu nol) km memiliki kondisi jalan rusak serta sepanjang 3,58 (tiga

koma lima delapan) km memiliki kondisi jalan rusak berat. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang sangat besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Pelayanan transportasi umum masyarakat Daerah dilaksanakan melalui perusahaan angkutan dalam kota dan luar kota. Pada tahun 2017, tercatat ada 19 (sembilan belas) tujuan perjalanan bus yang diberangkatkan dari Terminal Bus Sukabumi. Tujuan yang paling banyak diminati oleh penduduk Daerah adalah Bandung. Pada tahun tersebut, tercatat ada 276.888 (dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) penumpang yang diberangkatkan menuju Bandung. Rute lain yang cukup padat adalah Kota Sukabumi–Kampung Rambutan. Jumlah penumpang yang diberangkatkan menuju Kampung Rambutan tercatat sebanyak 30.070 (tiga puluh ribu tujuh puluh) orang.

Kereta api merupakan sarana transportasi yang relatif murah bagi masyarakat Daerah. Tanggal 15 Desember 2008 jalur tersebut mulai dibuka kembali dengan rute Sukabumi-Bogor dan rute Sukabumi-Cianjur. Pada tahun 2017, jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 591.826 (lima ratus sembilan puluh satu delapan ratus dua puluh enam) orang dengan jumlah pendapatan PT. Kereta Api Stasiun Sukabumi mencapai Rp. 7.790.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Terus membaiknya perekonomian, baik domestik maupun global, serta positifnya prospek perekonomian daerah ke depan, mendorong semakin besarnya peluang investasi yang dapat masuk ke Daerah, namun demikian peluang tersebut harus didukung pula oleh penciptaan situasi dan kondisi Daerah yang kondusif bagi investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi merupakan kondisi yang sifatnya multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan

bagi para investor untuk berinvestasi. Beberapa faktor pendorong iklim berinvestasi tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Berinvestasi di
Daerah Tahun 2013-2018

N.	Inditator/Saturan			Tal	nun		
No	Indikator/Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pelanggaran Perda (kali)	633	2914	1281	2126	1488	1720
2	Penyelesaian Pelanggaran Perda (persen)	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Demo/Unjuk Rasa (aksi)	27	20	31	42	47	31
4	Pajak Daerah (Milyar Rp.)	21,156	28,399	29,688	41,565	43,365	55,741
5	Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	9,926	10,889	10,975	8,795	8,795	8,331
6	Jumlah Jenis Pajak Daerah (buah)	9	9	9	9	9	9
7	Jumlah Jenis Retribusi Daerah (buah)	12	12	12	11	11	12
8	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	2	2	3	6	7	8
9	Jumlah Layanan Perizinan (buah)	32 Perizin an dan 6 non perizin an	32 Perizin an dan 6 non perizin an	42 perizin an dan 3 non perizin an	42 perizin an dan 3 non perizin an	42 perizin an dan 3 non perizin an	38 perizin an dan 3 non perizin an
10	Jumlah SOP terkait Pemberian Layanan Perizinan (buah)	32 Perizin an dan 6 non perizin an	32 Perizin an dan 6 non perizin an	42 perizin an dan 3 non perizin an	42 perizin an dan 3 non perizin an	42 perizin an dan 3 non perizin an	38 perizin an dan 3 non perizin an

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019

Ketentraman

Ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Pada kurun waktu tahun 2013-2018 terdapat rata-rata 1.694 (seribu enam ratus sembilan puluh empat) kasus pelanggaran perda namun seluruhnya dapat ditangani dengan persentase penanganan sebesar 100% (seratus persen). Selain pelanggaran Perda, kejadian lain yang berpotensi dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban adalah adanya aksi demo atau unjuk rasa. Jumlah unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2018 adalah 31 (tiga puluh satu) aksi, meningkat sebesar 14% (empat belas persen) dari jumlah demo atau unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2013 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) aksi namun menurun sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari jumlah demo atau unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 47 (empat puluh tujuh) aksi.

Iklim investasi di Daerah dapat juga dilihat dari jenis serta penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013-2018 terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah. Jumlah penerimaan dari 9 (sembilan) pajak daerah tersebut terus mengalami peningkatan dengan capaian penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 55.741.000.000,- (lima puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah), meningkat 163% (seratus enam puluh tiga persen) dari penerimaan pajak daerah tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 21.156.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta rupiah). Adapun jenis retribusi daerah yang ada di Daerah ada 12 (dua belas) jenis dengan jumlah penerimaan retribusi dalam kurun waktu tahun 2013-2018 fluktuatif dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 adalah Rp. 8.331.000.000,-(delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), menurun sebesar 16% (enam belas persen) dari penerimaan retribusi daerah tahun 2013 yaitu Rp. 9.926.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

Rasa aman dan kemudahan regulasi menjadi faktor yang menentukan dan mempengaruhi iklim berinvestasi. Jumlah Perda yang mendukung investasi pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) buah perda, meningkat 300% (tiga ratus persen) dari jumlah Perda yang mendukung iklim investasi pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) buah. Selain itu, dengan adanya Keputusan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah dimana Pelayanan Perizinan tersebut meliputi izin gangguan atau HO, izin usaha jasa kontruksi atau IUJK, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin tanda daftar industri atau TDI, izin usaha industri atau IUI, izin reklame, dan izin pengambilan air bawah tanah. Jumlah layanan perizinan yang ada pada tahun 2018 adalah 38 (tiga puluh delapan) layanan perizinan dan 3 (tiga) layanan non perizinan, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP terkait pemberian layanan perizinan dengan jumlah pada tahun 2018 adalah 38 (tiga puluh delapan) SOP terkait pemberian layanan perizinan dan 3 (tiga) SOP terkait pemberian layanan non perizinan.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau SDM yang unggul merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan daya saing daerah sehingga fokus kepada kualitas SDM merupakan hal penting dalam pembangunan daerah. Salah satu indikator untuk melihat kondisi SDM adalah rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau dependency ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 (enam puluh lima) tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Daerah Tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15
Rasio Ketergantungan Penduduk di Daerah
Tahun 2013-2019

NO	TAHUN	NILAI RASIO KETERGANTUNGAN
1	2013	35,68
2	2014	35,23
3	2015	47,62
4	2016	47,63
5	2017	46,89
6	2018	45,95
7	2019	48,16

Sumber: DKB Semester II Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk di Daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dimana rasio ketergantungan penduduk mencapai 48,16 (empat puluh delapan koma enam belas) artinya dari setiap 100 orang produktif harus menanggung 48 s/d 49 orang yang tidak produktif. Hal ini sedikit berbeda dengan keadaan rasio ketergantungan tahun 2018 dimana setiap 100 orang produktif harus menanggung 45 s/d 46 orang yang tidak produktif.

Berikut disajikan Tabel 2.16 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.16
Tabel Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Tahun 2013-2019

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			Ca	apaian kinei	rja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	laju pertumbuhan ekonomi (LPE; %);	5,41	5,43	5,14	5,64	5,43	5,51	5,49
2	laju inflasi (%);	8.03	8.38	2.20	2.57	4.10	2.95	2.33
3 4	ketimpangan kemakmuran (gini ratio); PDRB perkapita (ADHB); dan	0.40	0.36	0.43	0.42	0.40	0.40	0.41
5		11.18	11.64	9.06	8.24	8.00	8.48	8.44
1.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1	laju pertumbuhan penduduk (LPP; %);	N/A	1.02	0.98	0.94	0.84	0.77	0.73
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM);	70.81	71.19	71.84	71.33	73.03	73.55	74.31
3	tingkat kemiskinan (%)	8.05	7.65	8.79	8.59	8.48	7.12	6.67
4	angka melek huruf (AMH);	99.74	99.75	99.26	99.02	97.03	99.61	99.40
5	angka rata-rata lama sekolah (RLS);	8.52	8.70	9.08	9.28	9.52	9.53	9.58
6	angka harapan lama sekolah (HLS);	13.08	13.18	13.24	13.38	13.39	13.40	13.46
7	angka harapan hidup (AHH); dan	71.75	71.76	71.86	71.90	71.95	72.11	72.26

<u>NO</u>

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			C	apaian kine	rja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8	persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I.	22.99	22.77	22.95	22.75	22.74	22.74	22.60
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.	Urusan Wajib Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); %	55,36	82,49	62,94	80,02	67,72	63,4	73,21
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); %	99,74	99,76	100	100	100	99,61	100
3	APM(APM) SD/MI/Paket A; %	94,33	84,75	76,07	96,38	96,75	99,4	99,5
4	APM(APM) SMP/MTs/Paket B; %	81,06	71,29	70,63	96,13	96,5	96,4	97
5	APM(APM) SMA/SMK/MA/Paket C; %	100,77	73,89	62,34	97,85			
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; %	0	0	0	0,01	0,003	0	0
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; %	0,29	0,23	0,02	0,13	0,07	0	0
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA; %	0,72	0,16	0,2	0,04			
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI; %	100	100	100	100	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; %	99,98	100	100	100	100	100	100
11	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA; %	100	100	99,7	100			

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			Ca	apaian kinei	ja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; %	111,57	109,82	107,57	115,37	112,4	110,2	96,54
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; %	121,13	121,43	131,48	134,37	N/A	N/A	N/A
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; %	82,96	27,63	88,57	90,53	92	93	95,67
2.	Urusan Wajib Kesehatan							
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; %	100	98,63	95,98	97,25	96,13	100	100
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; %	92,14	93,65	98,3	98,97	96,84	97.9	100
3	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI); %	75,76	96,97	100	93,94	100	96.97	100
4	Cakupan BALITA gizi buruk mendapat perawatan; %	100	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; %	91,15	85,25	92,04	100	116,1	144.82	100
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; %	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; %	100	73,43	95,14	69,02	103,3	100	100
8	Cakupan kunjungan bayi; %	71,86	92,18	96,95	93,99	97,43	97,83	100
3.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			C	apaian kinei	ja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang jalan kota dalam kondisi baik; %	64,16	93,93	98,23	81,94	79,25	84,06	85,26
2	Rumah tangga bersanitasi; %	95,87	69,71	86,94	89,84	92,78	84,57	83,23
3	Kawasan kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89	1,89
4	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; %	2,93	79,87	23	31,7	32	31,77	47,28
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman							
1	Rumah tangga pengguna air bersih; %	94,16	92,64	84,2	85,97	94,21	86,39	83,23
2	Lingkungan pemukiman kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89	1,89
3	Rumah layak huni; %	93,21	95,51	95,51	95,98	95,98	97,04	97,42
5.	Urusan Sosial							
1	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; %	N/A	1,52	5,08	17,1	92,68	73,99	N/A
2	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi; buah	18	19	19	27	27	19	N/A
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; %	11,14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	PMKS yang memperoleh bantuan sosial; %	148,17	16,18	36,99	59,03	41,78	54,84	N/A

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			C	apaian kineı	rja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
6	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
7	Pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	140
В.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1.	Urusan Lingkungan Hidup							
1	Penanganan sampah; %	81,61	84,52	83,65	81,86	84,04	88,2	88,67
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal; %	36,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Kebersihan; %	N/A	50	100	100	100	100	N/A
4	Tempat pembuangan sampah atau TPS per satuan penduduk; TPS/mil	2,18	0,12	3,73	592,79	584,19	438,75	N/A
5	Penegakan hukum lingkungan ; %	100	100	100	100	100	100	N/A

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			С	apaian kine	rja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
2.	Urusan Kepemudaan dan Olah raga							
1	Gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta); permil	0,0056	0	0,006	0,006	0,006	0,0058	N/A
2	Lapangan olahraga; permil	0,3904	32,28	0,15	0,21	0,29	0,73	N/A
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,16
4	Peningkatan prestasi olahraga; Medali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27
5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	56,41
3.	Urusan Penanaman Modal							
1	Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah); %	11,4	85,14	182,39	-66, 24	30,63	280,43	38,92
4.	Urusan Koperasi dan UKM							
1	Koperasi aktif; %	57,39	61,38	44,56	60,71	61,15	61,23	61,45

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			Ca	apaian kinei	rja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Usaha mikro dan kecil; %	81,92	32,64	86,68	85,43	85,53	85,66	
5.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
1	Kepemilikan KTP; %	82,16	89,93	92,72	94,46	91,12	99,08	100
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; %	922,9	923	922,57	925,27	504,24	513,7	97,64
6.	Urusan Tenaga Kerja							
1	Pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh;%	N/A	48,56	48,59	54,5	49,88	98	N/A
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja; %	66,41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Pencari kerja yang ditempatkan; %	30,13	80,01	81,02	86,02	89,39	94,71	98,62
4	Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
7.	Urusan Pangan							
1	Regulasi ketahanan pangan; buah	5	Ada	Ada	Ada	1	1	N/A
2	Ketersediaan pangan utama; ton	239.265,27	382,29	237.707,26	210.505,96	210.517,80	190.201,77	N/A
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; %	9,57	15,42	17,95	27,03	27,03	15	N/A
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas; %	99,09	100	100	100	100	100	N/A

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			Ca	apaian kinei	rja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan; %	34,05	35,56	59,36	35,82	34,52	59,14	N/A
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02
9.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB							
1	Rasio petugas lapangan KB atau PLKB dan penyuluhan KB atau PKB di setiap kelurahan; %	N/A	1,83	1,74	0,94	173,68	173,68	N/A
2	Prevalensi peserta KB aktif; %	78,53	72,6	73,57	73,2	74,4	75	N/A
3	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I; %	23,03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,77
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,61
10.	Urusan Perhubungan							
1	Angkutan darat; %	37,02	2,27	48,93	31,82	43,48	43,48	N/A

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			C	apaian kine	rja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,26
11.	. Urusan Komunikasi dan Informatika							
1	Web site milik pemerintah daerah; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran atau <i>expo</i> ; kali	2	4	21	16	17	16	N/A
12.	Urusan Pertanahan							
1	Luas lahan bersertifikat milik Pemda; %	68,66	57,59	57,23	56,54	60,19	64	69
2	Penyelesaian kasus tanah negara; %	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesian ijin lokasi; %	100	100	100	100	100	100	100
4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100	100	100
13.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	PKK aktif; %	85,14	88,72	100	100	100	100	100
2	Posyandu;%	100	92,73	100	100	100	100	100
14.	Urusan Budaya							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya; kali	9	5	7	6	10	10	4
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya; buah	5	2	59	51	31	31	N/A

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Capaian kinerja							
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan;	60	0	100	100	67	67	N/A	
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48,24	
15.	Urusan Statistik								
1	Buku "Kota dalam angka"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Buku "PDRB Kota"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
16.	Urusan Kearsipan								
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku; %	30	84,38	100	87,5	87,88	100	100	
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan; kali	1	1	2	4	6	6	N/A	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,8	
17.	Urusan Perpustakaan								
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;%	42,65	20,94	20,94	94,85	94,84	93,36	93,36	
2	Pengunjung perpustakaan; %	38,79	34,72	55,39	95,6	92,21	98,82	N/A	
3	Nilai Budaya Baca; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,9	
C.	URUSAN PILIHAN								
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan								
1	Produksi perikanan; %	87,36	102,01	102,63	103,81	85,21	85,42	N/A	
2	Konsumsi ikan; %	78	100	97,16	100,79	164,32	160,42	N/A	

		Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja		Capaian kinerja							
NO		Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	3	Jumlah Total Produksi Perikanan ; %	87,36	102,01	102,63	103,81	85,21	85,42	N/A		
2.		Urusan Pertanian									
	1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; ton/ha	6,46	6,41	7,47	7,69	6,12	7,03	N/A		
	2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; %	3,6	3,25	4	3,94	3,82	3,59	3,5		
	3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun; ton/ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.052		
3.		Urusan Pariwisata									
	1	Kunjungan wisatawan; orang	141	86.431	127.235	116.79	212.713	188.928	N/A		
	2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; %	0,1	477,979	27,181	27,693	2,84	2,9	2,93		
	3	Tingkat hunian akomodasi; %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	628,32		
4.		Urusan Industri									
	1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; %	5,48	51,362	54,212	51,973	5,14	5,11	N/A		
	2	Pertumbuhan Industri ; %	5,98	23,695	1,886	20,194	2,02	1,58	N/A		
5.		Urusan Perdagangan									
	1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; %	45,7	42,97	41,109	400,577	39,41	39,09	38,92		
	2	Ekspor Bersih Perdagangan; US\$	-227.363.676	-1.536.953	9.787.652.700	1.908.889.300	1.298.244	1.965.131	N/A		
6.		Urusan Transmigrasi									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Capaian kinerja								
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Transmigran swakarsa ; %	100	100	100	100	100	100	100		
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2019	7.309.646,73	8.140.751,03	8.971.328,27	9 718 687.89	10 549 217.87	11 471 248.90	12 384 001.28		
3.1.1	Struktur Ekonomi Daerah Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku									
	Sektor Primer	4,06	4,00	3,93	3,82	3,60	3,50	3,43		
1	a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,06	4,00	3,93	3,82	3,60	3,50	3,43		
	b. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Sektor Sekunder	12,05	11,15	12,13	12,19	12.23	12.36	12.46		
	a. Industri Pengolahan	5,58	5,42	5,23	5,19	5,11	5,11	5,08		
2	b. Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,22	0,21		
	c. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12		
	d. Konstruksi	6,16	6,51	6,61	6,66	6,77	6,90	7,05		
	Sektor Tersier	83,89	84,85	83,94	84,00	84,17	84,15	84,10		
	a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	41,81	41,11	40,03	39,39	39,12	38,92	38,64		
3	b. Transportasi dan Pergudangan	9,31	9,82	10,60	10,70	10,60	10,83	10,77		
	c. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,54	2,72	2,77	2,84	2,90	2,93	3,02		
	d. Informasi & Komunikasi	3,52	3,60	3,58	3,72	3,79	3,75	3,77		

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			Ca	apaian kinei	rja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	e. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,17	9,94	10,29	10,66	10,94	10,94	10,95
	f. Real Estate	1,12	1,11	1,12	1,11	1,12	1,13	1,14
	g. Jasa Perusahaan h. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib i. Jasa Pendidikan		1,65	1,66	1,68	1,70	1,65	1,79
			5,83	5,71	5,50	5,24	5,13	4,87
			3,63	3,77	3,82	4,00	3,99	4,11
	j. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,63	1,68	1,73	1,77	1,76	1,82
	k. Jasa Lainnya	2,73	2,71	2,72	2,85	2,99	3,12	3,22
3.1.2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Daerah							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,49	4,66	1,90	0,38	-0,98	1,49	2,23
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Industri Pengolahan	3,70	3,93	2,71	3,77	4,35	5.25	3,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,27	3,76	2,98	7,50	4,76	2.57	3,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	-1,03	1,91	3,62	3,10	3.83	5,60
6	Konstruksi	7,89	9,80	5,82	6,88	7,52	7.7	7,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,01	5,65	3,73	4,44	4,70	4.94	4,72
8	Transportasi dan Pergudangan	4,33	3,65	7,49	6,46	4,75	5.74	7,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,67	8,77	7,87	7,45	7,28	7.39	7,01
10	Informasi dan Komunikasi	7,45	11,67	10,13	12,41	10,35	9.62	8,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,47	2,63	7,59	8,42	6,56	5.21	5,58
12	Real Estate	2,06	5,23	5,58	6,44	7,99	7.74	8,16

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja			Ca	apaian kine	rja		
NO	Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
13	Jasa Perusahaan	7,05	8,18	7,70	7,61	7,88	7.23	7,37
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-3,70	-3,52	1,21	1,37	0,20	0.51	0,21
15	Jasa Pendidikan	7,30	10,76	8,43	7,44	8,73	6.04	6,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,70	13,63	11,25	9,13	8,74	8.01	7,49
17	Jasa Lainnya	4,88	6,50	7,30	8,69	9,88	8.8	9,15
	PDRB ADHK (%)		5,43	5,14	5,64	5,43	5.51	5,49
3.2	Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur							
3.3	Fokus Iklim Berinvestasi							
3.3.1	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Berinvestasi di Daerah							
1	Pelanggaran Perda (kali)	633	2914	1281	2126	1488	1720	N/A
2	Penyelesaian Pelanggaran Perda (persen)	100	100	100	100	100	100	N/A
3	Jumlah Demo/Unjuk Rasa (aksi)	27	20	31	42	47	31	N/A
4	Pajak Daerah (Milyar Rp.)	21,156	28,399	29,688	41,565	43,365	55,741	N/A
5	Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	9,926	10,889	10,975	8,795	8,795	8,331	N/A
6	Jumlah Jenis Pajak Daerah (buah)	9	9	9	9	9	9	N/A
7	Jumlah Jenis Retribusi Daerah (buah)	12	12	12	11	11	12	N/A
8	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	2	2	3	6	7	8	N/A

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Ca	apaian kinei	rja		
NO		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Jumlah Layanan Perizinan (buah)	32 Perizinan dan 6 non perizinan	32 Perizinan dan 6 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	38 perizinan dan 3 non perizinan	N/A
10	Jumlah SOP terkait Pemberian Layanan Perizinan (buah)	32 Perizinan dan 6 non perizinan	32 Perizinan dan 6 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	38 perizinan dan 3 non perizinan	N/A
3.4	Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Rasio Ketergantungan Penduduk di Daerah	35,68	35,23	47,62	47,63	46,89	45,95	48,16

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2020

<u>2.5 PENERAPAN</u>

2.5. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Terdapat 29 (dua puluh Sembilan) jenis pelayanan dasar sebagaimana disajikan pada Tabel 2.17 berikut ini.

Tabel 2.17 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
SPM I	PM PENDIDIKAN								
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 Tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan PAUD	56%	DISDIKBUD				
2.	Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Jumlah WNI usia 7-15 Tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan Dasar	105%	DISDIKBUD				
3.	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah WNI usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3,3%	DISDIKBUD				
SPM I	KESEHATAN								
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan				
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan				



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan kesehatan balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19,98%	Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	67,72%	Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
SPM F	PEKERJAAN UMUM				
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	90,85%	DPUPRPKP2
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK)	96,78%	DPUPRPKP2
SPM F	PERUMAHAN RAKYAT				
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/ kabupaten	- Program Pengembangan Perumahan- Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana Alam	100%	DPUPRPKP2

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100%	DPUPRPKP2
SPM F	KETENTRAMAN, KETERTIBA	N UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAK	AT		
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase tingkat gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang tertangani	100%	DINAS SATPOL PP
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pelayanan informasi rawan bencana	100%	BPBD
22	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	BPBD
SPM S	OSIAL				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Program	Capaian 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	Dinas Sosial	
26	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	Dinas Sosial	
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	Dinas Sosial	
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	una sosial khususnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Resejahteraan Sosial		100%	Dinas Sosial	
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setalah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	Dinas Sosial	

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2020

2.6. ASPEK KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH ATAU BUMD

Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini. Daerah memiliki 3 (tiga) BUMD yaitu sebagai berikut:

- 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;
- 2. PD BPR Kota Sukabumi; dan
- 3. PD Waluya.

2.6.1. PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri dan berbentuk badan hukum, terlepas dari administrasi anggaran umum Pemerintah Daerah. Fungsi PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah sebagai penyedia air bersih atau air minum untuk masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut kegiatan perusahaan meliputi:

- 1. pelayanan air bersih atau air minum melalui perpipaan beserta perangkatnya;
- 2. pelayanan air bersih atau air minum melalui non perpipaan;
- 3. usaha lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja pendapatan serta perhitungan laba rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa tahun 2013-2019 disajikan masing-masing pada Tabel 2.18 dan Tabel 2.19 berikut ini.

Tabel 2.18 Kinerja Pendapatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Tahun 2013-2019

No	Uraian	Tahun									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1	Pendapatan O	ndapatan Operasional									
	a.Pendapata n Air (dalam juta)	17.815,4	17.946,7	18.641,3	19.404,7	19.355,2	22.220,5	24.390,7			
	b. Pendapata n Non Air	1.899,8	2.010,5	1.457,2	1.308,4	1.120,5	1.931,4	1.524,2			
	Jumlah	19.715,2	19.957,3	20.098,5	20.713,1	20.475,8	24.151,9	25.914,9			
2	Pendapatan No	on - Operasi	n - Operasional								
	(Bunga Deposito, Jasa Giro, Jasa Sewa Rumah Dinas, Piutang Rekening Air, Rupa-rupa dan Pendapatan Diluar Usaha Lainnya)	162,5	361,9	225,2	274,9	158.9	1.290,6	1.179,6			
Jumlah Total		19.877, 8	20.319,3	20.323,8	20.988,1	20.634,7	25.442,5	27.094,5			

Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Tabel 2.19
Perhitungan Laba Rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa
Tahun 2013-2019

	Uraian	Tahun						
No		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Usaha	19.715,2	19.957,3	20.098,5	20.713,1	20.475,8	24.151,9	27.094,5
2	Beban Langsung Usaha	5.532,8	5.783,8	6.857,3	6.110,5	5.993,4	6.749,7	13.450,1
Laba/Rugi Kotor Usaha		14.182,3	14.173,5	13.241,2	14.602,6	14.482,2	17.402,2	19.189,4
3	Beban Tidak Langsung Usaha	13.768,2	13.828,6	12.095,3	13.625,6	12.573,8	16.772,1	17.985,5
Laba/Rugi Usaha		414,1	344,8	1.145,8	976,9	1.908,4	630,1	1.2043,9
4	Pendapatan/Beban di Luar Usaha	155,9	314,3	213,6	223,4	152,6	134,7	165,3
Laba/Rugi Sebelum		570,1	659,2	1.359,5	1.200,4	2.061,1	764,8	2.218,1
Pajak								
5	Pajak PPH 29	-	_	180.09	=	-	-	
Laba	/Rugi Bersih	570,1	659,2	1.179,4	1.200,4	2.061,1	764,8	1.737,0

Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

- 1. PDAM Tirta Bumi Wibawa belum dapat memenuhi kepastian mengenai kualitas dan kontinuitas kepada pelanggan;
- 2. tingkat kehilangan air masih tinggi sebesar disebabkan jaringan serta jenis pipa transmisi dan distribusi sudah tua dan tidak memadai; dan
- 3. keterbatasan dana untuk meningkatkan kinerja aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam menghadapi permasalahan dalam pemberian pelayanan, Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa tetap berupaya melakukan peningkatan kinerja PDAM Tirta Bumi Wibawa melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- 1. upaya untuk memenuhi aspek kualitas dan kontinuitas air yaitu dengan meningkatkan kompetensi SDM dan fasilitas penguji laboratorium secara bertahap dalam mendukung kualitas air yang didistribusikan sesuai ketentuan serta meningkatkan kapasitas debit air, memperbaiki fasilitas jaringan, dan perpompaan, memperbaiki bocoran pipa pada jaringan transmisi dan distribusi;
- 2. melakukan efektivitas produksi dengan pengadaan dan pemasangan meter induk produksi serta melakukan rehabilitasi jaringan pipa transmisi dan distribusi; dan
- 3. pelepasan aset tidak produktif, peningkatan efektivitas penagihan, dan penyertaan modal secara berkesinambungan untuk mengatasi keterbatasan dana.

2.6.2. PD BPR Kota Sukabumi

Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai usaha simpan pinjam dengan tujuan untuk memberikan pinjaman bagi kalangan ekonomi lemah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, PD BPR menjalankan usaha-usaha sebagai berikut:

 menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk itu;

- 2. menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan pegawai yang mempunyai penghasilan tetap; dan
- 3. menempatkan dananya yang belum tersalurkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan pada bank lain.

PD BPR mempunyai sasaran yang ingin dicapai yaitu berkembangnya usaha yang sehat dan efisien. Adapun kinerja PD BPR pada tahun 2013 – 2019 disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Kinerja PD BPR Kota Sukabumi Tahun 2013-2019

No	Uraian		Angka Tahun (Dalam Juta)					
NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Dana	15.599,2	13.459,3	13.590,5	14.888,1	15.938,9	17.689,9	21.776,4
2	Realisasi Kredit	21.712,8	19.897,9	18.836,4	18.816,3	18.246,4	19.423,3	22.617,5
3	Realisasi Pendapatan	6.174,4	5.683,3	5.486,5	5.660,1	5.368,7	5.485,0	6.113,9
4	Realisasi Biaya	4.351,6	3.822,6	4.184,5	4.220,1	4.922,6	4.329,3	4.693,2
5	Realisasi Laba Kotor	1.823,0	1.861,0	1.302,0	1.440,0	446,1	1.155,8	1.420,8
6	Realisasi Laba Bersih	1.535,4	1.589,8	1.116,5	1.230,0	382,5	991,9	1.201,5
7	Realisasi PAD	844,5	874,3	614.0	676,4	210,3	545,5	660,8

Sumber: PD BPR Kota Sukabumi

Kinerja PD BPR mengalami peningkatan pada tahun 2018, baik dalam realisasi dana, kredit, pendapatan, biaya, laba kotor, laba bersih sehingga realisasi PAD pun meningkat. Terdapat beberapa hambatan yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. sulitnya mencari tenaga pemasaran yang berpengalaman;
- 2. suku bunga kredit BPR lebih tinggi dari suku bunga kredit usaha rakyat;
- 3. rendahnya kualitas SDM BPR khususnya tenaga analis kredit dan Pemasaran; dan
- 4. beralihnya Debitur BPR ke bank umum yang ditunjuk sebagai pelaksana KUR.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan PD BPR untuk mengatasi hambatan di atas adalah sebagai berikut :

menurunkan suku bunga kredit dari 18% (delapan belas persen)
 menjadi 15% (lima belas persen);

2. membuat

- 2. membuat produk kredit baru yaitu kredit sertifikasi guru dan produk tabungan anak sekolah;
- 3. mengikut sertakan karyawan BPR mengikuti pelatihan analis kredit dan merketing pada lembaga pelatihan LPPI jakarta; dan
- 4. menawarkan top up pinjaman pada debitur yang bagus.

2.6.3. PD Waluya Kota Sukabumi

PD Waluya merupakan BUMD yang berbentuk perusahaan atau korporasi. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1996 pada tanggal 28 November 1996 dengan nama Perusahaan Daerah Waluya Farma. Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat, mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah, dan terciptanya lapangan kerja, Perusahaan Daerah Waluya Farma berubah menjadi Perusahaan Daerah WALUYA (PD. WALUYA) pada tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, yang bergerak dalam bidang usaha:

- 1. perdagangan besar farmasi atau PBF dan pedagang besar alat kesehatan atau PBAK;
- 2. bidang kesehatan atau apotek; dan
- 3. usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja PD Waluya tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 2.21 berikut ini.

Tabel 2.21
Pencapaian Kinerja PD Waluya Kota Sukabumi
Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019
1	Aktiva Lancar	1.097.419.166	411.936.232	361.733.033
2	Aktiva Tetap	1.219.039.030	360.795.070	222.476.110
3	Total Aktiva	2.316.458.196	772.731.302	584.209.143
4	Hutang Jangka Pendek	3.050.179.717	3.691.782.237	3.691.782.237
5	Modal dan cadangan	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
6	Akumulasi Laba/rugi	(8.233.721.521)	(10.419.050.935)	(10.607.573.094)
7	Total Pasiva	2.316.458.196	772.731.302	584.209143

NO	URAIAN	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019
8	Penjualan Laba Bersih	737.477.813	843.209.600	780.154.700
9	Harga Pokok Penjualan	255.449.252	593.107.664	315.051.500
10	Laba atau Rugi Kotor	482.028.561	250.101.936	465.103.200
11	Biaya Penjualan	13.330.183	16.200.000	9.650.000
12	Biaya Umum dan Administrasi	757.435.495	720.596.068	652.402.775
13	Laba atau Rugi Operasi	(288.737.117)	(486.694.132)	(196.949.575)
14	Pendapatan Biaya dan Lain- lain	-	-	-
15	Pendapatan lain- lain	351.696	3.003.008	8.837.531
16	biaya Lain-lain	698.580	474.133	410.115
17	Jumlah Pendapatan biaya dan biaya Lain- lain	346.884	2.528.875	8.427.416
18	Laba atau Rugi Sebelum Pajak	(289.084.001)	(484.165.257)	(188.522.159)
19	Taksiran Pajak	-		-
20	LABA / (RUGI) BERSIH	(289.084.001)	(484.165.257)	(188.522.159)

Sumber : PD Waluya

Terdapat beberapa hambatan PD. WALUYA yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut :

- dengan adanya perpindahan poli poli di Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH. Resep Umum (tunai) terjadi penurunan penjualan di Apotik;
- 2. adanya Peraturan BPJS Kesehatan untuk pembagian rujukan ke Rumah Sakit Tipe A , Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E, berdampak penurunan pada penjualan.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan PD. WALUYA untuk mengatasi hambatan di atas adalah sebagai berikut:

- 1. kerjasama dengan Rumah Sakit Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E untuk menjemput Resep BPJS (Optik) "
- 2. letak Lokasi usaha Perusahaan Daerah Waluya Kota Sukabumi yang strategis belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Rencana kerjasama dengan Rumah Sakit R. Syamsudin, SH. dalam pemenuhan kebutuhan Khusus Poli, BPJS Program

<u>Rujukan</u> .	•	•		•	•	•	•	•	•
------------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Rujukan Balik, BPJS P23 Rumah Sakit dan Khusus Pasien rawat inap tunai.

2.7. ASPEK KERJASAMA DAERAH

Pasal 195 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

2.7.1. Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2019

Dalam memenuhi aspek kerjasama antar daerah maka kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2013-2019 sebagai berikut meliputi:

Tabel 2.22 Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2019

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	Kerjasama Antar Daerah		
1	Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	06/MoU/Adm.Pemb .&KD/2014 - 180/Pj.41- Huk/2014	Penyelarasan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di kedua daerah dalam hal penyediaan pelayanan publik
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat	119/83/Otdaksm	Penyelenggaraan Transisional Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3	Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	562/2835/435.104 /2015	Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum di Lokasi UPT
4	Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	44/PK/2016 - 560/406/Disnaker	Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah di Lokasi/Kawasan Pohorua Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
5	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten	119/178/KB/KS/IX /2017 -	Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
6	Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung	050/71/KB/Pemhu k/2017 - 06/MoU/Ekbang&K D/2017 - 510/Pj.49- Hukham/2017 - 188/19/Huk/2017 08/MoU/Ekbang&K D/2017 - 119/3470-Bag.KS	Best practices antar aparatur pemerintah atau city sharing, menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masingmasing daerah
7	Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi	130/1618- Diskominfo – 489/295/kominfo/2 017	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi <i>Smart City</i> Kota Bandung di Kota Sukabumi
8	Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi	510.8/01/Perj.KS/B PBD/2019 dan 367.1/05/DPK/201 9	Dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kota sukabumi
9	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat	100/ pem - phwt / 35. IX / 2019 08 /PKS / Ekbang & KD/2019	Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi Taluduti Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato
10	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	134.4/MoU- 19/Bagper/2019 dan 15/MoU/Ekbang&K D/2019	Mengoptimalisasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah
11	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat	20/MoU/Ekbang&K D/2020	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing Daerah guna meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang berkeadilan.

Sumber : Bagian Ekbang dan KD Setda Kota Sukabumi

2.7.2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Berbagai kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang telah dilakukan dari tahun 2013-2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.23 Kerjasama dengan pihak ketiga

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	Kerjasama Dengan Pihak Ketig	ga	
1	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. ASKES Cabang Sukabumi	01/MoU/Adm.Pemb .&KD/2013 - 005/MoU/2013	Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
2	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. TASPEN (Persero)	04/MoU/Adm.Pemb .&KD/2013	Kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI	04/PKS/Adm.Pemb &KD/2013	Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H di Kota Sukabumi.
4	Perjanjian Kerjasama antara Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Daerah dengan Pemerintah Daerah	02/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 41/PC-IPSI/SMI/I /2014	Perpanjangan Penyediaan Tenaga Pengajar/Pelatih Pencak Silat Pada Jenjang SD, SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta di Kota Sukabumi.
5	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI	08/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014	Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2014 M/1435 H di Kota Sukabumi
6	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi	11/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014- 580.4/02/U/BP/20 14	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
7	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Birru Wa Taqwa	12/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014- 30/BMT- BWT/XI/2014	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
8	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Nurul Ummah	13/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
9	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Amanah Umat	4/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 01.04/B/KBMT- Amat/XI/2014	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
10	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Syamsul Ulum	5/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 033/B.1/KBMT- SU/XI/2014	5/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 033/B.1/KBMT-SU/XI/2014
11	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi	2/MoU/Adm.Pemb. &KD/2014 - 155/I.O/F/II/2014	Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
12	Nota Kesepahaman antara Politeknik Negeri Jakarta dengan Pemerintah Daerah	3/MoU/Adm.Pemb. &KD/2014 - 340/PL3/HK/2014	Kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
13	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Daerah dan PT. Telekomunikasi Indonesia	5/MoU/Adm.Pemb. &KD/2014 - K.TEL.066/HK.840/ DTB-/2014	Penyediaan Layanan Information Communication and Technology atau ICT Telkom untuk Daerah Cyber City
14	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa	01/PKS/Adbang&K D/2015	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Daerah
15	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Beton Team Work	02/PKS/Adm.Bang. &KD/2015 - 007/BTW/PLM/01/ 2015	Penataan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga di Area Lapang Merdeka Daerah
16	Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI	03/PKS/Adbang&K D/2015	Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2015 M/1436 H di Kota Sukabumi
17	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah	09/PKS/Adbang&K D/2015 - 580.4/216/BP/201 5	Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
18	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Birru Wa Taqwa	10/PKS/Adbang&K D/2015 - 21/BMT- BWT/12/2015	10/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 21/BMT-BWT/12/2015
19	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Ex-depot Pertamina Sukabumi antara PT.	037/K20200/2015- SO - 06/PKS- SM/Admbang&KD/	Adapun lahan yang disewa tersebut akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara para

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	Pertamina (Persero) dengan Pemerintah Daerah	2015	pedagang Ex-Pasar Pelita
20	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. Indosat	01/MoU/Adbang&K D/2016 - 728/HOD- HODA/LGL/16	Kerjasama Pengembangan Program Smart City di Kota Sukabumi
21	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Indosat, Tbk	04/PKS/Adbang&K D/2016 - 5100002358	Pemanfaatan Lahan Untuk Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kota Sukabumi.
22	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa	06/PKS/Adbang&K D/2016	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi
23	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Supra Primatama Nusantara	09/PKS/Adbang&K D/2016	Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Sukabumi.
24	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa	31/PKS/Ekbang&K D/2017	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi
25	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi	01/MoU/Ekbang&K D/2019 dan 0002/UP- R/MOU/I/2019	Kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
26	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Universitas IBN Khaldun Bogor Tanggal: 11 Februari 2019	02/MoU/Ekbang&K D/2019 dan 468/K.12/UIKA/20 19	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
27	Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Institut Pertanian Bogor	03/MoU/Ekbang&K D/2019	Penyelenggaraan dan mengembangkan PSDKU IPB Kampus Sukabumi
28	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi	04/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 544/I.O/F/2019	Kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
29	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Institut Manajemen Wiyata Indonesia (IMWI)	05/Mou/Ekbang&K D/2019 dan 151/IMWI/MoU/04 /2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
30	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi (STIKES)	06/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 074/250/IV/STIKE S/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
31	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persatuan Guru Republik Indonesia Sukabumi (STIE PGRI)	07/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 1660/PKS/STIE- PGRI/KL/VI/2019	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
32	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim Sukabumi (STIE PASIM)	08/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 059/ai/SK/STIE- PASIM/KL/IV/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
33	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi (STAI Sukabumi)	09/Mou/Ekbang & KD/2019	Kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pihak demi kemajuan bersama.
34	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul 'Ulum (STAI SYAMSUL ULUM)	10/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 085/SKP/03.07/04 /2019	Kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama
35	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	11/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 639/B.8/STISIP- SU/IV/2019	Kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pihak

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	Syamsul 'Ulum (STISIP SYAMSUL 'ULUM)		demi kemajuan bersama
36	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Politeknik Sukabumi	11/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 639/B.8/STISIP- SU/IV/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
37	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI Sukabumi)	13/Mou/Ekbang & KD/2019 dan 173/STKIP- PGRI/KL/2019	Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
38	Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia	01.a / PKS / Ekbang & KD / 2019	Meningkatkan akses pelayanan bidang kesejahteraan dan Sosial kepada masyarakat kota sukabumi
39	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)	02/PKS/Ekbang & KD/2019 dan 1103/B18/HK/201 9	Program Diklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2019
40	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Institut Pertanian Bogor	04/PKS/Ekbang&K D/2019	Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) IPB di Kota Sukabumi
41	Kerja Sama Pemerintah Kota Sukabumi dengan PT. Darutaqwa	07/PKS/Ekbang&K D/2019	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi
42	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan PT. Sentra Teknologi Terapan	19/MoU/Ekbang&K D/2019 dan 003/VIII/ MoU/PTSTT/2019	Kerja sama di bidang Penelitian, Pengembangan, sosialisasi, pendampingan, dan Implementasi Metoda Tempat olah sampah Setempat Untuk Listrik Kerakyatan
43	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan PT. Sentra Teknologi Terapan Nomor : 19/MoU/Ekbang&KD/2019	003/VIII/ MoU/PTSTT/2019	Kerja sama di bidang Penelitian, Pengembangan, Sosialisasi, Pendampingan, dan Implementasi Metoda Tempat Olah Sampah Setempat Untuk Listrik Kerakyatan
44	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Universitas Gadjah Mada	21/MoU/Ekbang&K D/2019	Membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara para pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya para pihak untuk mengoptimalkan pembangunan di Kota Sukabumi

Sumber : Bagian Ekbang dan KD Setda Kota Sukabumi

2.7.3. Kerjasama Dengan Instansi Lain

Berbagai kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instansi lain yang telah dilakukan dari tahun 2013-2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.24 Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2019

	Kerjasama Antar Daeran Tanun 2013-2019					
No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal			
	Kerjasama Dengan Instansi La					
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat	02/MoU/Adm.Pemb &KD/2013 - KEP/416/DL/3/201 3 - PRJ- 003/PW10/1/2013	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.			
2	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)	03/MoU/Admpemk d/2013 - 15/IT3/KsM/2013	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat			
3	Kesepakatan Bersama antara Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah	15/BKS/MoU/04/2 013 - 05/MoU/Adm.Pemb &KD/2013	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dalam Program Kesejahteraan Sosial Terpadu			
4	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Daerah	07/HUK/2013 - 06/MoU/Adm.Pemb &KD/2013	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju Kota Sejahtera			
5	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik Daerah	07/MoU/Adm.Pemb &KD/2013 - 050/MoU/BPS Kota SMI/2013	Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.			
6	Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Pemerintah Daerah	2013- 10/MoU/Adm.Pem & KD/2013	Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan pada Pemerintah Kota Sukabumi			
7	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Padjadjaran Bandung	11/MoU/Adm.Pemb .&KD/2013	Dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.			
8	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti	001/SPJ/STIET/ XI/2013	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
9	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah	105/PKS/cb/PLPBK /2013 - 02/PKS/Adm.Pemb &KD/2013	Pelaksanaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas			
10	Pendidikan dan Pelatihan Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pusat	03/PKS/Adm.Pemb &KD/2013- 87A/PP.4/2013	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi atau DTSS Pelayanan Perpajakan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2013			
11	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah	162/NPK/cb/2013- 09/PKS/Adm.Pemb. &KD/2013	Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2013			
12	Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	13/PKS/Adm.Pemb. &KD/2013 - PRJ- 21/PW 10/1/2013	Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi			
13	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Sukabumi	07/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 0053.SP/040/AREA SKI/2014	Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah Kota Sukabumi.			
14	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	16/PKS/Adm.Pemb. &KD/2014 - 242/KTR/V-	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah			

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	Kesehatan Cabang Sukabumi	02/1214	Kota Sukabumi
15	Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sukabumi dengan Pemerintah Daerah	W.11.PAS.PAS21.PK .01.07.01-1261 - 07/MoU/Adm.Pemb .&KD/2014	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, Sesuai Dengan Fungsi dan Kewenangan Masing-masing.
16	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0607 Kota Sukabumi	01/MoU/Adbang&K D/2015 - B/71/I/2015	Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki para pihak dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Daerah
17	Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan Cabang Sukabumi dengan Pemerintah Daerah	12/PKS/Adbang&K D/2015 - 930/KTR/V- 02/1215	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
18	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi	12/PKS/Adbang&K D/2015 - 930/KTR/V- 02/1215	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi
19	Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Daerah	HK.201/1/7/STTD. 2015 - 05/PKS/Adbang&K /2015	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat
20	Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Wali Kota	17.21/MoU/1/09/2 016 - 02/MoU/Adbng&KD /2016	Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
21	Perjanjian Kerjasama antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah	01 Tahun 2016 – Nomor 01/PKS/Adbang&K D/2016	Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI Rahmatan Lil'Alamin Berbasis IC pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Daerah
22	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Tim Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Domisili/Multikampus Institut Pertanian Bogor di Sukabumi	06/PKS/Adbang&K D/2016 - B- 3545/0.2.14/GS.I/1 1/2016	Dukungan kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Domisili/Multikampus Institut Pertanian Bogor di Daerah
23	Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah	238/WPB.13/BD.03 /2016 - 08/PKS/Adbang&K D/2016	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
24	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi	11/PKS/Adbang&K D/2016 - 314/KTR/V- 02/2016	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
25	Nota Kesepahaman antara Direktorat Jeneral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah	20/KOMINFO/HK.0 3.02/05/2017 - 04/MoU/Ekbang&K D/2017	Kerjasama dalam implementasi gerakan menuju 100 <i>Smart City</i> di Daerah
26	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa	05/MoU/Ekbang&K D/2017 - MoU- 16/PW10/3/2017	Pengembangan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Pemerintah Daerah
27	Nota Kesepahaman antara Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) dengan Pemerintah Daerah	817/BBRVBD/II.1/ RH.01.01/12/2017 - 10/MoU/Ekbang&K D/2017	Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
28	Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dengan PT. PLN	01/PKS/Ekbang&K D/2019 dan 0012/AGA.01/UP3.	Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah Kota Sukabumi

No	Kegiatan	Nomor Kerjasama	Perihal
	(Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi	SKI/2019	
29	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi	06 / PKS / Ekbang & KD / 2019 dan Nomor : B- 04/M.2.13/Gs.1/08 /2019	Pelaksanaan Koordinasi Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Ruang Lingkup Penyelesaian permasalahan hukum yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundangundangan.
30	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dengan Antara Digital Media	09/PKS/Ekbang & KD/2019	Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pendapat umum dalam mendukung pembangunan Nasional
31	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Koperasi Karyawan – PLN SKI	17 Desember 2019 nomor: 11/PKS/Ekbang&K D/2019	Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bergulir Program Kredit Anyelir Bagi Wirausaha Baru Sukabumi Kece
38	Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi	12 / PKS / Ekbang & KD / 2019 dan Nomor: 520/KTR/V- 02/2019	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
39	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi	13 / PKS / Ekbang & KD / 2019 dan Nomor: 547/KTR/V- 02/1219	Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
40	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat	14/MoU/Ekbang&K D/2019	Meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah di Kota Sukabumi melalui standarisasi dan sertifikasi mutu halal
41	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat	530 / 348 / KOPDAGRIN /IV / 2019 / 9 APRIL 2019 dan 133A / SK / LPPOM / MUI- JB / IV / 2019	Sertifikasi Halal untuk Industri Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi
42	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Kantor Pertanahan Kota Sukabumi	206/PKS-32- 72/IV/2019	Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.
43	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Dompet Anak Bangsa	22/MoU/Ekbang&K D/2019	Optimalisasi peran dunia usaha dalam pencapaian Misi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Sumber : Bagian Ekbang dan KD Setda Kota Sukabumi

2.8. CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE 2013-2018

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Daerah didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Kebijakan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun

2013 – 2018 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018.

2.8.1. Pencapaian Misi I RPJMD Tahun 2013-2018

Misi I RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa dan Berilmu didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- 2. meningkatnya aktivitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawanan sosial;
- 3. meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan;
- 4. terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas:
- 5. terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan, dan kearifan lokal bagi masyarakat; dan
- 6. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca.

Capaian Misi I RPJMD pada tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.25 berikut ini.

Tabel 2.25 Nilai Capaian Misi I RPJMD pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Mem	lum enuhi rget		ıkup ıenuhi		menuhi arget
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	13	0	0,00	0	0,00	13	100,00
2	2015	7	0	0,00	0	0,00	7	100,00
3	2016	9	0	0,00	1	11,11	8	88,89

4	2017	9	0	0,00	2	22,22	7	77,77
5	2018	9	1	11,11	1	11,11	7	77,77

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014-2015 seluruh target pada Misi I berhasil dicapai. Persentase ketercapaian indikator Misi I pada tahun 2016-2018 cenderung mengalami penurunan dengan persentase sebesar 88,89% (delapan puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) pada tahun 2016 dan 77,77% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2016 dan 2018 terdapat 1 (satu) indikator yang termasuk ke dalam kategori cukup memenuhi target dengan persentase masing-masing 11,11% (sebelas koma sebelas). Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori belum memenuhi target.

2.8.2. Pencapaian Misi II RPJMD Tahun 2013-2018

Misi 2 RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar, dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas, didukung 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. meningkatnya mutu pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2. meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu;
- 3. meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik;
- 4. meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi;
- 5. meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
- 6. meningkatnya penegakan dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak; dan
- 7. meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan.

Capaian Misi II RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26
Nilai Capaian Misi 2 RPJMD pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Mem	lum enuhi rget	Cul Memo	kup enuhi		nenuhi arget
					Jml	%	Jml	%
1	2014	18	1	5,55	1	5,55	16	88,90
2	2015	15	1	6,67	-	-	14	93,33
3	2016	14	1	7,14	-	-	13	92,86
4	2017	14	0	0,00	0	-	14	100,00
5	2018	14	1	7,14	-	-	13	92,86

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013-2016 mayoritas indikator telah berhasil memenuhi target RPJMD. Terdapat masing-masing 1 (satu) indikator yang tidak berhasil mencapai target pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2017, seluruh indikator sudah memenuhi target. Namun pada Tahun 2018, kembali terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target.

2.8.3. Pencapaian Misi III RPJMD Tahun 2013-2018

Misi III RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Lebih Baik dan Berkualitas diukur melalui 17 (tujuh belas) sasaran yang akan dicapai, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi, dan daya saing di setiap jenjang pendidikan;
- 2. meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3. meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat;
- 4. terkendalinya kasus penyakit menular;
- 5. terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- 6. meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan;
- 7. meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat;
- 8. meningkatnya kemandirian masyarakat dalam promotif dan preventif bidang kesehatan; dan
- 9. meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar;

- j. terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera;
- k. meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
- meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan masyarakat;
- m. terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi;
- n. meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota;
- o. meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota; dan
- p. meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan.

Capaian Misi III RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.27 Nilai Capaian Misi 3 RPJMD Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Memo	um enuhi get		kup enuhi		enuhi rget
			Jml %		Jml	%	Jml	%
1	2014	50	4	8,00	5	10,00	41	82,00
2	2015	43	4	9,30	1	2,33	38	88,37
3	2016	44	2	4,55	0	0,00	42	95,55
4	2017	45	0	0,00	2	4,55	43	95,45
5	2018	45	1	2,22	1	2,22	43	95,55

Sumber: LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target pada tahun 2014-2018 dengan jumlah masing-masing 4 (empat) indikator pada tahun 2014 dan 2015, 2 (dua) indikator pada tahun 2016, dan 1 (satu) indikator pada tahun 2018. Pada tahun 2017, semua indikator sudah tercapai. Adapun tingkat ketercapaian indikator yang memenuhi target semakin meningkat tiap tahun dari 82,00% (delapan puluh dua koma nol nol persen) pada tahun 2014 menjadi 95,55% (sembilan puluh lima koma lima puluh lima persen) pada tahun 2018.

2.8.4. Pencapaian Misi IV RPJMD Tahun 2013-2018

Misi.

Misi IV RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah diukur melalui 17 (tujuh belas) sasaran yang akan dicapai. Pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku;
- 2. meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN;
- meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja;
- 4. meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
- 5. meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
- 6. meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha;
- 7. meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi;
- 8. meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM;
- 9. meningkatnya iklim usaha perdagangan yang kondusif;
- 10. meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah;
- 11. meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis;
- 12. meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis;
- 13. meningkatnya masyarakat kota sukabumi yang mengkonsumsi makanan non beras dan terigu;
- 14. tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata;
- 15. terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembangkan budaya;
- 16. meningkatnya pembinaan lembaga atau kelompok seni dan budaya; dan
- 17. meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi.

Capaian Misi IV RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.28
Nilai Capaian Misi IV RPJMD pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Mem	lum enuhi rget		kup enuhi		enuhi rget
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	38	4	10,53	3	7,89	31	81,58
2	2015	28	3	10,71	2	7,14	23	82,14
3	2016	28	3	10,71	2	7,14	23	82,14
4	2017	30	0	00,00	1	3,33	29	96,67
5	2018	30	0	00,00	0	0,00	30	100

Mayoritas indikator pada Misi IV RPJMD pada tahun 2014-2018 sudah memenuhi target >80% (delapan puluh persen) meskipun masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target. Dari tabel terlihat bahwa ada peningkatan persentase indikator yang memenuhi target dari 81,58% (delapan puluh satu koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2014 menjadi 100% (seratus persen) pada tahun 2018.

2.8.5. Pencapaian Misi V RPJMD Tahun 2013-2018

Misi V RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota diukur melalui 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

- 1. meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 2. meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana;
- 3. meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
- 4. terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama;
- 5. meningkatnya penanganan persampahan perkotaan; dan
- 6. meningkatnya kebersihan dan keindahan kota.

Capaian Misi V RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.29 berikut ini.

Tabel 2.29 Nilai Capaian Misi V RPJMD pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Mem	lum enuhi rget		kup enuhi		nenuhi arget
			Jml %		Jml	%	Jml	%
1	2014	17	-	-	-	-	17	100,00
2	2015	14	-	-	-	-	14	100,00
3	2016	15	-	-	-	-	15	100,00
4	2017	16	-	-	-	-	16	100,00
5	2018	18	-	-	-	-	18	100,00

Pada misi 5, seluruh indikator telah masuk dalam kategori memenuhi target atau sebesar 100% (seratus persen).

Capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2.30 Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja			Taı	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	_	jawab
Misi	1 : Mewujudkar	n Reformasi Birokras	i Menuju Sumber	Daya Man	usia yang l	Beriman ,	Bertaqwa d	lan Berilm	u						<u> </u>		<u>I</u>
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi	Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda	Indeks reformasi birokrasi	N/A	51,22	53,27	57,27	61,27	65,27	51,22	N/A	50,7	67,92	68,03	68,79	indeks	Sekretariat Daerah
1	birokrasi pemerintah daerah	Program Peningkatan dan pengembangan penyelengaraan pemerintah daerah	Kategori Akuntabilitas Kinerja	В	В	ВВ	BB	A	A	В	В	BB	ВВ	BB	ВВ	nilai	Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawan an sosial.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kenaikan ZIS.	20,66%	22,30%	23,94%	25,58%	27,22%	28,86%	20,66	20,57	24,74	21	70,11%	98,42%	%	Sekretariat Daerah
3	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Program pembinaan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan	Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	60,00	62,00	72,00	80,00	63,10%	24,00%	%	Sekretariat Daerah

<u>No.</u>

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		rembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
4	Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas	80%	82%	84%	86%	88%	90%	80,00	83,00	93,00	100,00	82,04%	107,00%	%	BKPSDM
	berkualitas	Program pendidikan kedinasan	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	85%	100%	100%	100%	100%	100%	85,00	97,00	102,30	100,00	97,67%	99,00%	%	BKPSDM
5	Terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan	Cakupan sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti	N/A	8	11	14	17	21	N/A	12	15	24	17	17	Sekolah	Dinas Pendidikan dan
	dan kearifan lokal bagi masyarakat.	Tahun	Persentase siswa yang mendaftar ke SMP yang memiliki ijasah Madrasah Diniyah	40%	40%	50%	100%	100%	100%	40	100,00	71,00	100,00	100%	100%	%	Kebudayaan

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		1 cmbangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
6	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca.	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	30.000	77.596	50.145	106.342	105.276	181.030	orang/ tahun	Dispusip

Misi 2 :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas

1	dan sistem pelaksanaan penga pengendalian interr intern dalam penge penyelenggara pelak	ngkatan m awasan nal dan endalian ssanaan akan kepala	Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	opini	Inspektorat
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu Pembanganan daerah yang terpadu Pembanganan pembangunan daerah yang terpadu Programperen	ram canaan canaan canaan embangan vah strategis cepat tumbuh	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD	80	80	80	90	90	90	80	82,19	86,76	91,82	95,54	94,83	%	Bappeda

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		rembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
		Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya															
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	Program	Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah	51	51	51	51	51	51	51	51	54,04	56,3	62,09	61,62	%	
3	anggaran yang	peningkatan dan pengembangan pengelolan keuangan daerah	Persentase peningkatan PAD	15	15	15	15	15	15	15	9,5	7,11	6,65	21,59	0,92	%	ВРКО
4	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah OPD yang telah menerapkan e- Gov (terintegrasi)	N/A	N/A	N/A	7	12	13	N/A	N/A	N/A	7	26	38	OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Meningkatnya kualitas pelayanan	Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda	nilai rata-rata IKM	В	В	В	В	A	A	В	В	В	В	В	В	nilai	Sekretariat Daerah
	masyarakat.	Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah	Jumlah Kelurahan yang berkategori:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DP2KBP3 APM								

<u>No.</u>

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
		Tingkat Kewilayahan	1. Swasembada	7	7	10	15	18	20	7	3	8	9	13	12	Kelurah an	
			2. Swakarya	21	21	19	15	13	11	21	18	25	24	17	18	Kelurah an	
			3. Swadaya	5	5	4	3	2	2	5	12	0	0	3	3	Kelurah an	
6	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum untuk kepastian hukum	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	232,93	89,20	%	Sekretariat Daerah
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	78,76	85	90	92	95	98	78,76	89,93	92,72	94,46	98,5	96,55	%	
7	Meningkatnya kualitas layanan administrasi	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu keluarga	90	93	94	95	96	98	90	N/A	105,57	97,87	97	94,32	%	Disdukcapil
	kependuduka n.	•	Cakupan penerbitan akta kelahiran	89,19	90	92	94	96	98,00	89,19	92,3	100,28	92,57	94,84	97,99	%	
			Cakupan penerbitan akta kematian	-	40	50	60	70	80	40	N/A	139	73,08	81	64,64	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
8	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan	Program Perbaikan sistem administrasi	Jumlah OPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	N/A	1	2	3	4	5	N/A	1	2	3	4	5	OPD	Dispusip
	kearsipan daerah.	kearsipan	Persentase kearsipan daerah berbasis digital	N/A	N/A	5	10	15	20	N/A	N/A	5	10	15	20	%	Dispusip
Misi	3 : Mewujudkan	Pelayanan Dasar Ya	ng Lebih Baik dar	Berkualit	as	L	L	L					L	l .		L	
		Program Wajib Belajar Pendidikan	APM(APM) SD/MI/ Paket A	99,7	99,8	99,85	99,9	99,93	99,95	99,7	84,75	79,73	96,38	96,7	97,2	%	
		Dasar Sembilan Tahun	APM(APM) SMP/MTs/ Paket B	98,6	98,8	99,0	99,2	99,5	99,70	98,60	71,29	70,63	96,13	96,5	96,4	%	
1	Meningkatnya mutu , relevansi dan	D.	APM(APM) SMA/SMK/ Paket C	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,56	62,34	97,73	97,8	92,87	%	
	daya saing pelayanan pendidikan	Program Pendidikan Menengah	Angka Melanjutkan (AM) SMA/SMK/MA ke perguruan tinggi	20	23	26	29	31	34,00	N/A	N/A	26,27	29,56	31,4	49,7	%	
		Program manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kepemilikan kartu cerdas siswa drop out dan miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja			Taı	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
			Presentase siswa rawan DO SMA, SMK dan MA.	<18	<18	<18	<18	<18	<18	<18	15	7,14	5,72	5,72	0,11	%	
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	9,53	9,56	9,6	9,7	9,72	9,73	9,53	9,53	9, 57	9,75	9,71	9,73	Tahun	
2	Meningkatnya kinerja pendidik, tenaga kependidikan dan pengawas pendidik.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah kualifikasi S2	9	10	11	11,5	12	12,5	9	12	13,75	13,8	8,1	8,2	%	
3	Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	130	130	135	130	125	120	130	N/A	127,31	97,64	116,47	116,73	per 100,000 KH	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Tembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka kematian bayi	9,5	9,5	10	9,5	9	8,5	9,5	7,11	7,96	7,65	6,82	5,86	per 1000 KH	Dinas Kesehatan
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	N/A	N/A	11	11	10,5	10	11	N/A	5,43	6,46	6,31	3,88	%	Reservation
			Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	N/A	N/A	10	9	8	7	10	N/A	4,59	5,57	7,75	6,05	%	
4	Terkendalinya kasus penyakit menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penangganan Penyakit Menular	100	100	100	100	100	100	100	N/A	120,91	108,64	107,87	109,29	%	
5	Terwujudnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	45	50	55	60	65	70	70	N/A	53,73	88,13	126,15	135,71	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
		1. Program pelayanan Kesehatan untuk penduduk miskin 2. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya, 3. Program Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Rumah Sakit yang di fasilitasi Pemerintah Daerah	0	0	1	0	0	0	N/A	N/A	1	N/A	1	0	unit	
6	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	0	0	100	100	100	100	N/A	N/A	119,72	89,4	100	100,24	%	Dinas Kesehatan
7	Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	95,71	101,45	103,3	100,13	100	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1	jawab
	kesehatan masyarakat		yang berkualitas sesuai kebutuhan														
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan legalitas dan keamanan produk makanan PIRT	100	100	100	100	100	100	100	66,00	104,4	100,11	108,65	100	%	
8	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam promotiv dan preventif bidang kesehatan	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	3	N/A	5	10	15	20,00	5	N/A	3,00	12,12	15,15	20,00	%	
9	Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar	Program Pangadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pencapaian nilai akreditasi rumah sakit versi 2012	N/A	50	50	60	70	80	N/A	N/A	80	87,7	96,23	96,23	%	RSUD R. Syamsudin, SH
10	Terkendalinya pertumbuhan pendu-duk serta meningkatnya keluarga yang	Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Keluarga Berencana	Rata-rata usia nikah pertama wanita	21,30	21,30	21,30	21,32	21,32	21,32	21,3	23,23	23,28	23,35	21,32	23,28	tahun	1. Disdukcapil 2. DP2KBP3 APM
	berkualitas dan sejahtera	Program Penyiapan tenaga pendamping	Persentase keluarga prasejahtera	25,92	25,45	25,05	24,60	24,15	23,70	23,7	22,77	22,95	22,75	22,7	22,7	%	

<u>No.</u>

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		rembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
		kelompok bina keluarga	dan sejahtera I														
		Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi dan Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	67,10	67,20	67,45	67,60	67,70	67,75	67,1	72,6	73,57	73,20	74,14	75,09	%	
		Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase anggota parlemen perempuan	10	30	30	30	30	30	10	16,67	16,67	17,24	17,14	17,14	%	
11	Meningkatnya peran perempuan dalam	Program	Partisipasi pekerja Perempuan di Lembaga Eksekutif	14,97	15,37	15,77	16,17	16,57	16,97	14,97	54,68	N/A	27,03	27,21	46,91	%	DP2KBP3 APM
	pembangunan	penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	59	60	65	70	75	80	50	N/A	96,34	91,97	100	100	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		1 cmoungumum	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
		Program Peningkatan Kualiatas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35,45	35,5	35,55	35,61	35,69	35,78	35,45	35,56	35,6	35,82	36,01	59,14	%	
12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Program peningkatan partisipasi	Persentase posyandu strata mandiri	9,62	20	30	40	50	60	9,62	N/A	26,4	30,97	47,57	57,17	%	
	potensi pemberdayaa n masyarakat	masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Persentase LPM berprestasi	58,54	58,54	60,98	63,41	65,85	68,29	58,54	N/A	78,05	78,05	75	75	%	
13	Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan PMKS	20	25	30	35	40	45	20,00	16,18	29,00	43,25	41,78	53,60	%	Dinas Sosial

No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1	jawab
	Terwujudnya kota yang	Program Perencanaan Tata Ruang	Persensate kesesuaian fungsi lahan dengan dokumen tataruang hasil pengendalian pemanfaatan ruang	60	70	75	80	85	90	60	N/A	75	75	87	93,53	%	DPUPRPKP2
14	teratur sesuai penataan ruang	Program Pengelolaan ruang	Luas RTH : Hutan Kota	3,18 На	3,78 Ha	7,08 Ha	9,08 Ha	10,08	11,08	3,18	4,8	7,09	7,09	12,18	12,18	На	
		terbuka hijau (RTH)	Luas RTH : Taman kota dan jalur hijau	15На	16,50 Ha	16,67 Ha	16,90 Ha	17,1	17,3	15	15,06	15,82	15,69	20,83	24,68	На	
		Program Pengelolaan areal pemakaman	Luas RTH : Lahan pemakaman	34,20На	34,3	34,4	34,5	34,6	34,7	34,2	34,2	34,44	34,58	35,87	36,07	На	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	83,35	83,5	83,63	83,76	83,89	84,02	83,35	84,5	83,65	84,31	84,5	84,3	%	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota	Perogram Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	85,15	86,28	85,42	85,82	86,09	86,49	85,15	95,51	85,42	85,82	96,43	97,29	%	DP2KBP3 APM
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	63,63	64,3	65,6	68,3	71	72,3	63,63	83,8	65,6	99,96	70,9	87,57	%	
		Program Perlindungan dan	Jumlah kampung iklim	N/A	1	2	3	4	5	N/A	3	4	4	12	16	На	Dinas Lingkungan

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		rembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	=	jawab
		Konservasi Sumber Daya Alam															Hidup
		Program pengendalian	jumlah sungai bersih dan terpelihara	2	3	4	5	6	7	2	N/A	4	4	6	7	lokasi	
		pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	jumlah lokasi memenuhi baku mutu udara ambien	4	6	8	10	12	14	4	N/A	8	8	12	14	lokasi	
			Kawasan kumuh	160	150	140	100	70	30	160	140	100	N/A	97,76	30	На	
	Meningkatnya kualitas dan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	87,02	88,72	90,42	92,12	93,82	95,52	87,02	77,64	90,42	92,12	97,83	95,52	%	DPUPRPKP2
16	keterse-diaan infrastruktur pendukung kota		Persentase kondisi jalan baik	66,49	67,27	69	71	73	75	66,49	67,46	70,09	76,62	79,24	91,98	%	Dishub
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jalan lingkungan baik	58,14	64,13	68,93	71,28	73,62	75,14	58,14	64,13	68,93	84,58	98,04	81,99	%	DPUPRPKP2

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		rembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018]	jawab
			Persentase fasilitas perlengkapan jalan :														
			a. Rambu	50	56	62	68	74	80,00	50,00	71,76	73,69	79,92	84,32	85,96	%	
	Meningkatnya kualitas	Program	b. Marka	40	60	80	100	100	100,00	40,00	76,49	99,38	129,38	539,49	679,49	%	
17	pelayanan jasa transportasi	peningkatan dan pengamanan lalu lintas	c. APILL siap ATCS	67	75	83	92	100	100,00	66,67	91,67	0,00	91,67	91,67	100,00	%	Dishub
	jalan		d. Cermin Tikungan	38	48	58	68	78	88,00	37,50	87,50	127,50	152,50	137,50	175,00	%	
			e. Pagar Pengaman	13	15	17	19	21	23,00	13,00	51,00	56,00	N/A	69,20	70,70	%	
			f. PJU	79	82	86	90	94	97,00	78,75	87,21	92,81	97,36	97,97	102,26	%	
	•						ı	ı			ı		ı			•	

Misi 4 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat,dan transparan sesuai peraturan yang berlaku	Program Peningkatan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Perizinan tepat waktu	75	75	75	80	80	80,00	75,00	75,51	83,00	94,00	95,00	85,00	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
---	---	--------------------------	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target								Satuan	OPD Penanggung				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
2	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Nilai Investasi PMA (juta)	45.978	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	45,900	14,760	0,000	0,000	21.500	15.000	juta rp	
			Nilai Investasi PMDN (juta)	125.919	132.214	133.474	134.733	135.990	137.251	125.919	340.131	915.612	458.449	290.721	2.278.380	juta rp	
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas - Tenaga Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	40	45	50	55	60	65	40,00	64,25	59,99	41,8	99,94	71,34	%	Dinas
4	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		Persentase tenaga berbasis kompetensi	N/A	16	N/A	18	19	20	16,00	26,67	33,33	66,67	98,61	45	%	Tenaga Kerja
5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1038	5000	5000	5000	5000	5000	1.038	5.789	5.297	5.173	5.107	5.049	orang	
	Meningkatnya produktifitas UMKM	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase peningkatan IKM Produktif	73	75	77	79	81	83	73,00	73,00	73,03	73,98	74,49	74,89	%	
6	melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase peningkatan usaha mikro kecil dan menengah	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,50	0,50	85,04	87,34	0,69	0,92	%	Diskopdagrin
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Jumlah Pengembangan Pasar Rakyat	1	N/A	1	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	unit	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target									Satuan	OPD Penanggung			
			Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
		Dalam Negeri															
7	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi Aktif	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50	61,00	58,50	59,79	46,56	47,34	61,15	61,23	%	
	permodalan bagi pelaku	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	Persentase peningkatan LKM: KSP/ USP Aktif	97,3	97,8	98,3	98,8	99,3	99,8	97,30	98,70	96,25	N/A	95,4	95,58	%	
8			Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima penguatan permodalan	N/A	200	200	200	200	200	1.681	211	241	285	92	537	ukm	
9	Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan Pedagang	1	2	2	2	2	2	1	2	14	N/A	2	3	kawasan	
10	Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras)	120	125	125	125	125	125	120,00	125,00	220,44	188,35	261,61	128,68	%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian,
		Pertanian/ Perkebunan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	80	80	80	80	80	80	80,00	90,00	98,53	109,11	97,37	111,74	%	dan Perikanan

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Target Kinerja									Satuan	OPD Penanggung				
		1 cmoungumum	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018]	jawab
			Tingkat keamanan pangan	78	79	80	80	80	80	78,00	80,69	84	92,29	85,45	78	%	
11	Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis	Program Peningkatan kesejahteraan petani dan program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan	Persentase LKM-PUAP dan LKD- Demapan berklasifikasi sehat	20,83	29,17	50	52	54	56,00	20,83	66,00	50,00	50,00	78,57	56,00	%	
			Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani	11,03	13	15,86	20,69	25,52	30,34	11,03	20,15	26,92	33,12	36,84	50,00	%	
	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis	Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan	N/A	N/A	0,5	1	1,5	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	%	
12		Program pengembangan budidaya perikanan dan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Prosentase pelaku usaha perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB	20	N/A	45	55	65	75	20,00	N/A	51,22	50	75	80	%	

No.	No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	-	jawab
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkeb unan dan program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Provitas padi	6,46	6,39	6,49	6,58	6,58	6,78	6,46	N/A	7,44	7,64	7,10	5,95	ton/ha	
		Program penanggulangan penyakit ternak dan program penerapan teknologi peternakan	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	N/A	N/A	20	40	60	80	N/A	N/A	20	36	80,00	100,00	%	
		Program Penataan dan Pengembangan kawasan agribisnis	Terbangunnya kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC)	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	1	1	1	lokasi	
		Program pengembangan budidaya perikanan	Produktifitas budidaya perikanan	20,64 ton/ha	21,11 ton/ha	21,32 ton/ha	21,53 ton/ha	21,75	21,97	20,64	N/A	22,30	22,16	24,59	21,92	ton/ha	
13	Meningkatnya masyarakat Kota Sukabumi yang mengkonsum si makanan non beras dan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Skor pola pangan harapan (PPH)	72	74	75	76	77	78	72,00	74,82	75,83	84,6	85,8	79,7	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Tembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		jawab
	terigu																
14	Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual	Program Pengembangan dan pemasaran	Waktu kunjungan wisata	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	4	hari	Disporapar
	destinasi pariwisata	pariwisata	jumlah wisatawan	95.700	105.770	110.000	115.000	120.000	125.000	95.700	141.300	127.235	117.638	212.713	188.928	orang	
15	Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembang kan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	gedung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya	Program ekonomi kreatif berbasis seni budaya	Jumlah event pagelaran budaya	1	1	6	6	6	6	1	3	4	4	6	6	event	
17	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regional/ nasional	33,33	33,33	75	80	90	90	33,33	37,00	76	76	75	78	%	Disporapar

No.			Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1	jawab
	5 : Meningkatka dahan, dan Kebe	an Keamanan, Ketert ersihan Kota	tiban,						,								
		Program pemeliharaan kamtramtihaas	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	N/A	N/A	55	65	80	92,50	N/A	75,00	85,00	85,00	81,00	89,60	%	Satuan Polisi Pamong Praja
		kamtramtibnas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase unjuk rasa yang terkendali	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	Meningkatnya ketentraman dan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan	N/A	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100	%	Satuan Polisi Pamong Praja
	ketertiban masyarakat.	Program pemeliharaan kamtramtibnas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penanganan ganguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	90	95	95	95	95	95	90	100	100	100	100	100	%	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar	N/A	10	20	30	40	50,00	N/A	34,48	65,51	72,14	72,41	68,97	%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

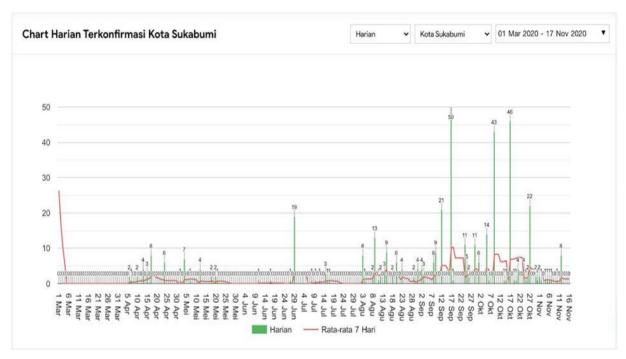
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		Pembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	=	jawab
2	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan	Program pencegahan dini dan penangulangan	Persentase tingkat kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulanga n bencana	1	1	1,05	1,1	1,16	1,22	1,00	1,00	1,00	1,10	1,16	1,22	%	Badan Penaggulang
	masyarakat dalam penanganan resiko bencana	penangulangan korban bencana alam	Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana	N/A	80	80	90	90	90,00	N/A	N/A	N/A	100,00	90,00	90,00	%	an Bencana Daerah
			Zona tangguh bencana	N/A	N/A	N/A	1	1	2,00	N/A	N/A	N/A	2,00	1,00	9,00	ZTB	1
3	Meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya masyarakat,	Program Pendidikan politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada	76,79	77	0	0	0	78,00	76,79	80,26	N/A	N/A	0,00	78,10	%	
	dan organisasi kemasyarakat an	masyarakat	Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang terdaftar	45	60	70	80	80	80,00	45,00	62,98	71,90	80,29	81,07	81,94	%	Kantor Kesatuan Bangsa dan
4	Terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama	22,85	10	10	10	10	10,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Politik

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja			Tar	get					Rea	lisasi			Satuan	OPD Penanggung
		rembangunan	Program	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	-	jawab
5	Meningkatnya penanganan persampahan perkotaan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase reduksi sampah kota	1,25	1,84	2,55	3,23	3,88	4,51	N/A	N/A	N/A	6,16	6,37	5,86	%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan	jumlah jalan tertib sampah	7	8	9	10	11	12	0	0	9	9	12	13	ruas jalan	
		Kinerja Pengelolaan Persampahan	jumlah perumahan tertib sampah	4	5	6	7	8	9	0	0	6	6	8	9	lokasi	
6	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH taman Kota dan jalur hijau dalam kondisi baik	62	68	73	77	81	86	N/A	N/A	79,2	76,8	86	86	%	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru	0	0	4,5	2,5	0	0	0	0	3,8	8,7	0	0	ha	Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya biopori dan tanaman yang	Program Pengelolaan Ruang Terbuka	Jumlah RTH Jalur Hijau	22	22	24	26	28	30	0	0	0	0	28	31	lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
	menyerap air	Hijau	Jumlah RTH Taman Kota	17	19	21	23	25	27	0	0	0	0	25	47	lokasi	пішир

2.9. KONDISI.

2.9. KONDISI PASCA PANDEMI COVID-19

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan kesehatan muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk dampak yang terjadi di Daerah. Per tanggal 17 November 2020, total jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Sukabumi menjadi sebanyak 549 orang. Dari total kasus positif Covid-19 tersebut, 28 pasien saat ini menjalani perawatan dan 387 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari penyakit Covid-19. Dan pasien positif yang meninggal sebanyak 5 orang.



Gambar 2.22 Sebaran Pasien Terkonfirmasi di Kota Sukabumi

Secara sebaran kasus terkonfirmasi positif di Daerah relatif rendah dengan angka di bawah 10 kasus per hari dalam rentang pengamatan dari 1 Maret 2020 sampai dengan November 2020. Beberapa lonjakan kasus terjadi pada 29 Juni 2020 dan terdapat kenaikan kasus yang cukup tinggi mulai dari 9 September 2020, dan mencapai titik puncak di 17 September 2020 dengan 50 kasus terkonfirmasi. Demikian pula di periode bulan Oktober 2020, kasus harian berada di atas rata-rata dan bahkan mencapai kembali titik puncak 46 kasus positif terkonfirmasi di 17 Oktober 2020.

Di bulan November, tidak terdapat lonjakan pada kasus positif terkonfirmasi kecuali hanya pada tanggal 11 November sebanyak 8 kasus terkonfirmasi sebagai titik tertinggi. Dengan tren kasus terkonfirmasi positif yang mulai melandai di bulan terakhir, diharapkan kasus positif makin menurun, sehingga perhatian khusus Pemerintah Daerah bisa fokus dalam melakukan pemulihan atas dampak covid19 tersebut di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pemerintah pusat dan Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran dan penularan covid19 tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) bernomor pemerintah pusat HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam SK Kementerian Kesehatan tersebut, hanya disebutkan PSBB berlangsung untuk masa terpanjang inkubasi virus atau 14 hari. SK Kementerian Kesehatan tersebut merupakan pencetus yang melahirkan kebijakan lanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian memberlakukan penerapan PSBB di seluruh Wilayah Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakukan **PSBB** Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona virus Disease 2019 yang efektif dimulai pada 6 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2020. Kemudian, dikarenakan tidak terjadinya penurunan kasus konfirmasi positif di Jawa Barat, maka dikeluarkan kembali perpanjangan PSBB sampai dengan 12 Juni sebagaimana ditetapkan dalam Lembaran Keputusan Gubernur Jawa Barat bernomor 443/Kep.287-Hukham/2020.

Daerah menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi dengan mengeluarkan instrumen kebijakan berupa Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid19 di Wilayah Kota Sukabumi. Diantara peraturan yang paling penting terkait dengan PSBB yang kemudian akan memberikan dampak ke beberapa sektor kehidupan masyarakat adalah Pasal 3

ayat 4 yang memberikan pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor;
- kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- kegiatan sosial dan budaya; dan
- pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Pemerintah Daerah juga mengeluarkan kebijakan tambahan untuk memperkuat Peraturan Walikota sebelumnya yaitu Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19 di Daerah. Dari instrumen kebijakan kedua ini diharapkan masyarakat serius untuk mematuhi aktivitas PSBB dan aparat Pemerintah Daerah memiliki instrumen hukum untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat khususnya di Daerah.

2.10. CAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berperan penting sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. TPB dapat menjadi instrumen dalam perumusan isu strategis untuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan Program atau KRP, untuk menjamin bahwa KRP yang disusun dapat mendukung pencapaian TPB, mengingat pencapaian TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Terdapat empat pilar utama TPB yakni sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Keempat pilar dijabarkan ke dalam 17 tujuan TPB yang masing-masing tujuan TPB memiliki indikator yang berperan sebagai instrument penilaian

terhadap pencapaian target Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, isu-isu strategis – yang mencakup aspek ekonomi, sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan – berkaitan erat dengan pencapaian TPB seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.23 berikut ini.



Gambar 2.23
Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan
Pencapaian TPB

(Sumber: Folke, dkk, 2016)

Gambar 2.23 di atas menceritakan bahwa kondisi lingkungan atau *biosphere* merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

2.10.1. Kondisi Umum Capaian Target TPB

Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator berdasarkan kondisi geografis, terdapat 222 indikator TPB terkait kewenangan kota. Capaian setiap indikator TPB dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 menurut Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Capaian TPB digolongkan kedalam lima kategori, yakni "Telah

mencapai

mencapai target nasional", "Belum mencapai target nasional", "Perlu peningkatan", "Perlu penurunan", serta "Tidak ada data (N/A)". Rangkuman capaian indikator TPB Kota Sukabumi ditunjukkan pada Tabel 2.31 berikut ini.

Tabel 2.31 Capaian TPB Daerah

	ТРВ	Jumlah indikator	Telah mencapai target nasional	Belum mencapai target nasional	Perlu pening- katan	Perlu penuru- nan	Tidak ada data (N/A)
1	Tanpa Kemiskinan	25	10	5	5	2	3
2	Tanpa Kelaparan	11	6	1	0	4	0
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	12	4	3	6	9
4	Pendidikan Berkualitas	13	8	3	1	0	1
5	Kesetaraan Gender	14	8	0	0	0	6
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	3	4	1	0	10
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	0	0	0	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	0	1	2	0	16
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	13	1	0	2	0	10
10	Berkurangnya Kesenjangan	6	2	1	1	0	2
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	20	7	2	0	2	9
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	3	1	0	0	1
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	2	1	0	0	1	0
14	Ekosistem Laut	0	0	0	0	0	0
15	Ekosistem Darat	4	3	0	0	0	1
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	21	9	1	1	0	10
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	15	11	0	1	0	3
	Total er: Hasil Analisis, 201	222	84	23	17	15	83

Sumber: Hasil Analisis, 2018



Gambar 2.24 Capaian TPB Daerah

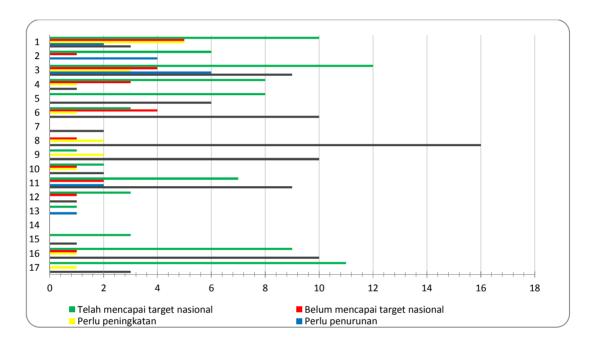
(Sumber : Hasil analisis 2018)

Indikator TPB di Daerah yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 03 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) dengan jumlah 34 (tiga puluh empat) indikator. Selanjutnya, pencapaian target nasional paling banyak kedua dan ketiga ada pada tujuan TPB 01 dan TPB 16 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) dengan jumlah 25 (dua puluh lima) dan 21 (dua puluh satu) indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui *gap*-nya dengan jumlah terbanyak juga terdapat di TPB 03. Secara lebih rinci, indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbagi atas indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target serta indikator TPB sudah dilaksanakan dan belum mencapai target.

Indikator TPB yang perlu dilakukan penurunan dengan jumlah terbanyak yaitu pada tujuan TPB 02. Selanjutnya, terdapat tujuan TPB dengan indikator yang memiliki kriteria perlu pendataan terbanyak ada pada tujuan TPB 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya). Disisi lain, terdapat indikator TPB yang hanya memiliki kriteria belum diketahui nilai gap (N/A), yakni pada tujuan TPB 07 (Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua) dan TPB (Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). TPB 14

Ekosistem

Ekosistem Laut bukan merupakan kewenangan Daerah karena masuk dalam kewenangan tingkat Provinsi. 139 atau 62,61% indikator yang terisi atau diketahui nilai capaiannya, lainnya sebesar 37,38% masih tidak tersedia data sehingga masih banyaknya indikator yang belum terdapat datanya dapat menyebabkan hasil capaian tidak dapat merepresentasikan kondisi Daerah. Total pencapaian indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada Gambar 2.25 berikut ini.



Gambar 2.25 Grafik Capaian Indikator TPB Daerah

(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Persentase berdasarkan enam kriteria indikator TPB tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.23 dengan persentase terbesar yaitu 45,36% (empat puluh lima koma tiga puluh enam persen) yang dimiliki oleh kriteria indikator yang belum diketahui nilai gapnya (N/A). Adapun persentase terbesar kedua diikuti oleh kriteria indikator belum mencapai target dengan nilai 19,59% (sembilan belas koma lima puluh sembilan persen). Kriteria telah mencapai target hanya mencapai nilai 12,37% (dua belas koma tiga puluh tujuh persen).



Gambar 2.26
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap
Target Proyeksi 2030

(Sumber: Hasil Analisis, 2018)

2.10.2. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

Pilar sosial terdiri dari 5 tujuan TPB yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Pada kewenangan tingkat kota terdapat 95 indikator yang tercakup dalam pilar sosial. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar sosial di Kota Sukabumi ditunjukkan pada Tabel 2.27 berikut ini.



Gambar 2.27
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap
Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Sosial

(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Pada pilar sosial, sebanyak 45,36% indikator telah mencapai target nasional, 13.40% indikator belum mencapai target nasional, 9.28% indikator perlu peningkatan, 12.37% perlu penurunan, dan 19,59% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang belum mencapai target nasional perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan dalam bidang sosial di Kota Sukabumi. Selain itu, indikator

TPB pilar sosial yang tidak tersedia data capaiannya juga perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar sosial di Kota Sukabumi secara utuh.

Tabel 2.32 Kondisi Baseline Indikator TPB dalam Pilar Sosial

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
1	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	9.30% (2017)
	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	86,3%
	terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar,	1.4.1.(g) APM(APM) SD/MI/sederajat. 1.4.1.(h) APM(APM)	92,87% 87,94%
	kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	SMP/MTs/sederajat. 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0- 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	92,00% (2017)
	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial,	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko	Meninggal: 0,03% jiwa, hilang: 0 jiwa, terluka: 0 jiwa (2017)
	lingkungan, dan bencana.	bencana daerah. 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	835 orang (2017)
		1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	141 orang (2017)
		1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana	1 kota (2017)

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
		alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman	
		Bencana) 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	114 (sedang) (2017)
		1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 1.5.3* Dokumen strategi	Rp 2761150000 (2017) 0 dokumen (2017)
		pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	` '
	1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasa n kemiskinan.	Rp 3.000.000.000 (APBD), Rp 3.727.350.000 (8238 orang) (2017)
		1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rp319.910.806 .999 (2017)
2	2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Konsumsi pangan : 2142 kkal/ hari (2017)
	rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 2.1.2*	2,42% (2017) Kota
		Prevalensi penduduk dengan	Sukabumi tidak ada rawan pangan

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
		kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarka n pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/	0,004% (2017)
	2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah	kapita/hari. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7,58%
	usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0,19%
		2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	12,58%
		2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	77,4%
		2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	79,9
3	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	116 (2017)
	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran	2,81%

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
	seluruh negara berusaha	hidup.	·
	menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	2,97
	25 per 1000	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2,97
	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 3.3.2.(a) Insiden	0,04% (2017)
	terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta	Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	(2017)
	penyakit menular lainnya.	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,003%
		3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	22 kabupaten/ kota
		3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Filariasis 26 kasus; Kusta 3 Kasus
		3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0
	3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	19,9
	penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	1,46% (2017)
	mental dan kesejahteraan	3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	15
	3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1(a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	7

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
		3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	0
	3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	93,75
	3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	10.77 per 100000 penduduk (2017)
4	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	SD (Bahasa Indonesia: 73,70; matematika: 74,71; IPA: 65,87), SMP (Bahasa Indonesia: 63,80; matematika: 36,23; bahasa inggris: 48,42; IPA: 40,91) 2017)
		4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	95%
		4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	94%
		4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	102,2%
		4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederaja t.	10338%
		4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	9.71 tahun (2017)
	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	56,22%

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
	dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.		
	4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan.	4.5.1* Rasio APM(APM) perempuan/laki- laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederaj at; (3) SMA/SMK/MA/se derajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki- laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD: 99.75%, SMP: 103.65%, SMA: 103.3% (2017)
	4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,99% (2017)
	kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100,00% (2017)
	4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	a) SD 100%, SMP 100%; b) SD 6,6%, SMP 36,4%; c) SD 20%, SMP 65,91%; e) SD 100%, SMP 100%; f) SD L 35,4% P 21,2%, SMP L 26,4% P 17,3% (2017)
	4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP,	Jumlah guru: SD: 1623, SMP:

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
	meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	811; SMA: 471, SMK: 651 (2017)
5	5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	40
	5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	160,40% (2017)
	5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	134,25% (2017)
Sumbor	5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. : Hasil Analisis, 2020	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memili ki telepon genggam.	85,55

Sumber: Hasil Analisis, 2020

2.10.3. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi terdiri dari 5 tujuan TPB yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Pada kewenangan tingkat kota terdapat 55 indikator yang tercakup dalam pilar ekonomi. Persentase capaian

indikator TPB untuk pilar ekonomi di Kota Sukabumi ditunjukkan pada Gambar 2.28 berikut ini :



Gambar 2.28
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap
Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Ekonomi

(Sumber: Hasil Analisis, 2018)

Pada pilar ekonomi, sebanyak 25,45% indikator telah mencapai target nasional, 3,64% indikator belum mencapai target nasional, 10.91% indikator perlu peningkatan, dan 60% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu menjadi perhatian karena kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar ekonomi di Kota Sukabumi secara utuh.

Tabel 2.33
Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Ekonomi

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
8	8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. 8.5.1* Upah ratarata per jam pekerja.	Total UMKM tahun 2017 18446 unit (2017) Rp2.158.000 per 8 jam kerja (2017)
	nilainya.		

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
9	Secara Signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	231.846 orang (2017)
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memili ki telepon genggam	85,55%
	mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet	42,47% (2017)
10	10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	9,3% (2017)
17	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	96,97% (2017)
	17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada
	yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	8836 (2017)
		17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas	96% (2017)

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
		terhadap akses	
		data Badan Pusat	
		Statistik (BPS).	

Sumber: Hasil Analisis, 2020

2.10.4. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan hidup terdiri dari 5 tujuan TPB yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Pada kewenangan tingkat kota terdapat 49 indikator yang tercakup dalam pilar lingkungan hidup. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar lingkungan hidup di Kota Sukabumi ditunjukkan pada Gambar 2.29 berikut ini:



Gambar 2.29
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap
Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Lingkungan Hidup
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)

Pada pilar lingkungan, sebanyak 34,69% indikator telah mencapai target nasional, 14,29% indikator belum mencapai target nasional, 2.04% indikator perlu peningkatan, 6.12% perlu penurunan, dan 42,86% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator pada pilar lingkungan yang belum mencapai target nasional perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Sukabumi. Selain itu, indikator TPB yang tidak tersedia data capaiannya juga perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar lingkungan di Kota Sukabumi secara utuh.

Tabel 2.34 Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Lingkungan Hidup

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
6	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	27 desa/kelurahan (2017)
	perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	27 desa/kelurahan (2017)
11	11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	2,75
	diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.	11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	2 rute (2017)
	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan.	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Meninggal: 0,03% jiwa, hilang: 0 jiwa, terluka: 0 jiwa, mengungsi: 0 jiwa (2017) 1 set (2017) Rp2.761.150.00 0 (2017)
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	83,9%

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
12	12.4 Pada tahun 2020	12.4.2.(a) Jumlah	650 kg/hari
	mencapai pengelolaan bahan	limbah B3 yang	
	kimia dan semua jenis	terkelola dan proporsi	
	limbah yang ramah	limbah B3 yang	
	lingkungan, di sepanjang	diolah sesuai	
	siklus hidupnya, sesuai	peraturan	
	kerangka kerja internasional	perundangan (sektor	
	yang disepakati dan secara	industri).	
	signifikan mengurangi		
	pencemaran bahan kimia		
	dan limbah tersebut ke		
	udara, air, dan tanah untuk		
	meminimalkan dampak		
	buruk terhadap		
	kesehatan manusia dan		
	lingkungan.		
13	13.2 Mengintegrasikan	13.1.2* Jumlah	Meninggal:
	tindakan antisipasi	korban meninggal,	0,02%,
	perubahan iklim ke dalam	hilang dan terkena	Hilang: 0 jiwa,
	kebijakan, strategi dan	dampak bencana per	terkena dampak
	perencanaan nasional.	100.000 orang.	0,02%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

2.10.5. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan tata kelola kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan hanya terdiri dari 1 tujuan TPB yaitu TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Pada kewenangan tingkat kota terdapat 21 indikator yang tercakup dalam pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar hukum dan tata kelola kelembagaan di Kota Sukabumi ditunjukkan pada Gambar 2.30 berikut ini:



Gambar 2.30
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap
Target Proyeksi 2030 dalam Hukum dan tata kelola kelembagaan

(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Pada pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, sebannyak 42,86% indikator telah mencapai target nasional, 4,76% indikator belum mencapai target nasional, 4.76% indikator perlu peningkatan, 0% indikator perlu penurunan, dan 76.19% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu menjadi perhatian karena kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar hukum dan tata kelolaa kelembagaan di Kota Sukabumi secara utuh

Tabel 2.35
Kondisi *Baseline* Indikator TPB Dalam Pilar Hukum
Dan Tata Kelola Pemerintahan

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2019)
16	16.6 Mengembangkan	16.6.1.(b) Persentase	1,02
	lembaga yang efektif,	peningkatan Sistem	
	akuntabel, dan transparan di	Akuntabilitas Kinerja	
	semua tingkat.	Pemerintah (SAKIP)	
		Kementerian/Lembaga	
		dan Pemerintah Daerah	
		(Provinsi/ Kabupaten/Kota).	
	16.7 Menjamin pengambilan	16.7.1.(a) Persentase	0,17
	keputusan yang responsif,	keterwakilan	
	inklusif, partisipatif dan	perempuan di Dewan	
	representatif di setiap tingkatan.	Perwakilan Rakyat	
		(DPR) dan Dewan	
		Perwakilan Rakyat	
		Daerah (DPRD).	
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun	98,51
	syah bagi semua, termasuk	yang kelahirannya	
	pencatatan kelahiran.	dicatat oleh lembaga	
	-	pencatatan sipil,	
		menurut umur.	
		16.9.1.(b) Persentase	97,8
		anak yang memiliki	
		akta	
		kelahiran.	

Sumber: Hasil Analisis, 2020